SAFARI DAUD
Penyunting:
Muhammad Candra Syahputra

RE-ORIENTASI POLITIK NU PADA MASA ORDE BARU

(Analisis Tiga Strategi Politik NU Tahun 1984-1998)

RE-ORIENTASI POLITIK NU PADA MASA ORDE BARU

(Analisis Tiga Strategi Politik NU Tahun 1984-1998)

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :
Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1. 000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5. 000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

RE-ORIENTASI POLITIK NU PADA MASA ORDE BARU

(Analisis Tiga Strategi Politik NU Tahun 1984-1998)

Safari Daud

Penyunting
Muhammad Candra Syahputra

PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

RE-ORIENTASI POLITIK NU PADA MASA ORDE BARU
(Analisis Tiga Strategi Politik NU Tahun 1984-1998)

Penulis:
Safari Daud

Penyunting:
Muhammad Candra Syahputra

Desain Cover & **Layout**
Pusaka Media Design

viii + 91 hal : 14 x 21 cm
Cetakan, Januari 2021

ISBN: 978-623-6024-08-9

Penerbit
PUSAKA MEDIA
Anggota IKAPI
No. 008/LPU/2020

Alamat
Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Politik seringkali diterjemahkan secara sederhana sebagai tindakan politik. Ketika penyempitan makna terjadi seperti ini, asumsi politik selalu terbangaun kepada sifat-sifat yang negatif, membolehkan semua cara agar semua tujuannya tercapai. Dengan kata lain teori induktifitas Machivellian tidak dilihat secara historis tetapi diterima tanpa ada *teserver* atau menerimanya secara *taken for granted*. Pada pengertian yang lebih luas, politik itu sendiri terumuskan dalam pengertian yang sangat luas, menyangkut teknik mempengaruhi manusia dengan segala macam ragamnya baik dari segi nilai,sosial ekonomi, keyakinan, budaya, etika dan estetika.Pada tingkatan perguruan tinggi, semua aspek ini terumuskan dalam mata kuliah "ilmu politik".

Buku "Re-Orientasi Politik Nu Pada Masa Orde Baru (Analisis Tiga Strategi Politik NU Tahun 1984-1998)" menunjukan kepada pembaca bahwa politik tidak hanya terbatas pada tindakan politik praktis. Di mana sebelumnya sejarah NU menunjukkan kejamudan organisasi ini dalam partai politik, namun sejak era orde baru terjadi perubahan yang besr dan secara berkelanjutan bingkai politiknya berubah mengikuti irama kemanusiaan. Semua perumusan sikap politik tersebut menariknya tidak terlepas dari analisis keagamaan sehingga sikap politiknya menjadi religius dan berdiameter dengan pemaknaan politik yang sedehana.

Satu teori yang dibangun dalam buku ini adalah pandangan yang mengatakan bahwa NU meninggalkan dunia politik dibantah, karena sejak era ini NU lebih mengedepankan politik pemberdayaan. Politik pemberdayaan tersebut adalah kemendirian politik, penguatan *civil socierty* dan pemberdayaan ekonomi mikro. Secara grafik, kemandirian politik dan penguatan *civil socierty* dapat di katakan berhasil, namun pada pemberdayaan ekinimi mikro mengalami kegagalan baik secara konsep maupun pada pemberdayaan perilaku di analisis dalam konteks kebijakan dan ideologi ekonom dunia, sehingga cita-cita mulia ini dapat berjalan dengan problematikanya teratasi.

Akhirnya, penulis berterimakasih kepada semua pihak yang menyediakan waktu dan sumber daya dalam penyelesaian buku ini. Mudah-mudahan Allah SWT, melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua sehingga dapat melahirkan karya-karya yang lebih baik lagi, Amin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar belakang 1
B. Rumusan masalah 3
C. Tujuan dan manfa'at 3
D. Kajian pustaka 4
E. Kerangka teori 7
F. Metode penelitian 12
G. Sistematika pembahasan 14

BAB II. NU ORDEBARU, DAN RE-ORIENTASI STRATEGI POLITIK **15**
A. Politik Orde Baru Terhadap Islam 15
B. Hubungan Antagonis NU Dengan Orde Baru 25
C. Kembali Kepada Khittah; Strategi Politik 30
D. Postulat Awal Kelahiran NU 36

BAB III. TIGA STRATEGI POLITIK NU PASCA MUKTAMAR SITUBONDO 50
A. Kemandirian Politik NU 50
B. Politik Akomodasi Kritis NU Terhadap Orde Baru 62
C. Indipendensi Masyarakat Sipil 71

BAB IV. PENUTUP 87
A. Kesimpulan 87

DAFTAR PUSTAKA..... 89

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegrtian rezim dari orde lama menuju orde baru turut mempengaruhi dinamika politik Nahdlatul Ulama (NU). Walaupun terjadi secara bertahap, pengaruh orde baru turut memperbaharui model pilitik organisasi tersebut. Potret orde baru sejak berhasil menumbangkan komunis, berointerasi kepada pelaksana pembangunan ekonomi. Dalam kacamata orde baru, orientasi politik pada ideologi yang berbeda-beda dipandang sebagai pemicu konfilk yang berkepanjangan. Orientasi politik berdasarkan ideologi harus dikubur, sebab orientasi demikian di anggap tidak menyelesaikan masalah.[1]

Hal ini dibuktikandengan suatu momentum penting dalam lintas sejarah NU, yakni kesediannya untuk kembali kepada khittah 1926 yang di kukuhkan dalam keputusan Muktamar NU di Situbondo 1984.[2] Atas dinamika orde baru, NU melakukan perubahan strategi orientasi unttuk kembali kepada kegiatan sosial keagamaan, pendidikan dan dakwah. Aspek ini yang pada gilirannya dapat

[1] M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta: Granmedia, 1994) h.202

[2] Eniar Martahar Sitempul, *NU dan Pancasila* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), h.207

ditanggkap sebagai bentuk dari sebuah model pengembangan masyarakat Islam.

Mayoritas peneliti menilai keputusan NU kembali ke khittah 1926 sebagai langkah NU meninggkatkan dunia politik. Kesimpulan ini menimbulkan tanda tanya, meningkat pilitik dalam tubuh NU telah lama berlangsung bahkan hampir menjadi tradisi gerakannya sejak awal. Jika yang dimaksud meninggalkan politik praktis mungkin ada benarnya, karena kegiatan politik praktis NU dengan menceburkan organisasi ini sebagai bagian dariorolitik praktis NU dengan menceburkan organisasi ini sebagai bagian dari organ politik praktis telah berlangsung selama rentan waktu 1952-1984. Kajian-kajian yang menyatakan NU telah meninggalkan dunia politik pada msa orde baru, kiranya terjebak dalam makna maninggalkan politik praktis. Mestinya harus dibedakan pengertian antara"meninggalkan politik praktis" dan "meninggalkan politik" karena politik yang mempunyai makna universal dan teoritis inilah yang sebenarnya menjadi akar dari politik NU sejak kelahirannya.

Dalam mode seperti ini, NU sejak kehadirannya telah menunjukan model yang tegas dan kritis terhadap kebijakan kolonial yang memutuskan kemandirian berpolitik dan menceburkan NU sendiri dengan lebel dan lambang politik. NU juga di sisi lain bisa dikatakan bersikap akomodatif terhaap kepemimpinan Soekarno, tetapi tidak pernah memberi apapun terhadap komunis, sampai akhirnya menghadapi tetangga serius kebijakan politik orde baru dengan mengembangkan karakter baru organisasi sesuai dengan tuntutan zaman.

Dengan bahasa yang lebih tegas, NU pada masa ordebaru sejatinya tidak meninggalkan politik, tetapi mempunyai strategi politik tersendiri yang berbed dengan masa-masa sebelumnya. Sikap politik NU pada masa orde baru tampaknya lebih memusatkan pada strategi NU dalam mengembangkan sebuah model masyarakat Islam di Indonesia, strategi-strategi itu dilakukan NU dalam menghadapi mesin politik orde baru yang anti demokrasi.

Kembalinya organisasi ini ke akar historis pada Muktamar 1984 memiliki beberapa tujuan utama. Di antaranya memantapkan diri sebagai pembela *ahlusunnah wal jam'ah* di Nusantar,

memperhatikan pemberdayaan pendidikan, gerakandekwah dan mengembalikan mitivasi organisasi yang mempunyai kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi maupun persoalan kemasyarakatan secara umum.[3]

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, perubahan gaya, model, dan pola politik NU pada masa orde baru sangat penting untuk dikaji secara akademis. Hal ini terutama diletakan dalam bingkai pengembangan masyarakat baik secara spiritual, interaksi dan usaha perbaikan ekonomi umat.peneliti ini dibatasi pada masa setelah Muktamar Situbondo tahun 1984 dengan keputusan untuk kembali kepata khittah,sampai berakhirnya era orde baru pada tahun 1998. Muktamar tersebut menandai sebuah oven sejarah penting NU dalam kaitannya dengan sikap politik de era orde baru.

B. Rumusan Masalah

Perubahan-perubahan gaya dan corak politik NU pasca Muktamar Situbondo merupakan salah satu strategi politik NU dalam mengakomodir dinamika yang terjeda selama era orde baru yang secara umum terfokus kepada pengembangan masyarakat Islam. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi politik NU pada kurun waktu 1984-1998?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji strategi politik NU pasca Muktamar Situbondo 1984 sampai dengan 1998.
2. Mengkaji strategi NU dalam pengembangan masyarakat Islam terutama dengan bidang spriritual-moral, interaksi dan budaya, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Kegunaan penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan teoritis, diharapkan memperkaya wawasan akademis mengenai strategi NU dalam merespon dinamika politik orde baru yang meliputi beberapa strategi pengembangan masyarakat

[3] Chairul Anam, *Pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama.* (Sala:Jatayu Sala, 1985), h. 15

Islam di bidang spritual-moral, intelektual dan budaya, serta pemberdayaan ekonomi umat.
2. Kegunaan praktis diharapkandapat memberikan inspirasi bagi pengembangan organisasi Islam dalam mengembangkan nilai-nilai politik yang beradab, bermoral mempunyai daya tawar intelektual dan mengembangkan suatu budaya dinamis.

D. Kajian Pustaka

Terkait dengan kajian tentang masalah ini, terlebih dahulu perli disebutkan tulisan Deliar Noer *Partai Islam Pentas Islam, kasih dan analisis perkembangan politik Indonesia 1945-1963*. Buku ini dapat dikatakan representasi menawarkan kondisi dan perjalanan partai-partai politik Islam dalam dekade 1945-1965. Buku ini secara meyakinkan memberi penjelasan mengenai terkait antara kepemimpinan dan ideologi yang dianut masing-masing tokoh dan partai tersebut. Prinsip-prinsip ideologi dan ketokohan mereka ini menurut akademis ilmu politik ini sarat dengan pola dan gaya perjalanan partai dalam menghadapi berbagai keadaan dan kebijakan kekuasaan. Fokus penelitian tulisan ini pada partai-partai islam telah mampu menjelaskan antara keyakinan ideologi berbagai partai Islam tersebut dengan gerakan partai dalam pentas nasional.[4]

Tetapi penelitian Noer ini lebih banyak menitikberatkan kepada partai Masyumi dan sangat sedikit masalah politik NU, kekurangan ini tentu perlu di tambah dengan beberapa contoh tentanf studi-politik NU yang patut di sebutkan di sini. Namun tulisan Diliar Noer ini cukup menggambarkan potret polarisasi antara partai politik Islam termasuk di dalamnya adalah NU.

Kajian mengenai NU secara umum dapat di katakan kajian yang sangat bersemangat dalam bidang kajian organisasi sosial-keagamaan di Indonesia. Dan tulisannya dapat dikategorikan dalam beberap jenis penulisan atas penelitian. Di antaranya adalah jenis penelitian historis, penelitian sosiologis-antropologis, penelitian biografi penelitian politik, penelitian sosio-intelektual, ataupun jenis penelitian lainnya.

[4] Untuk lebih jelasnya, lihat Deliar Noer. *Pertai Islam Di Pentas Nasional, Kisah Dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965* (Bandung: Mizan, 2020)

Jenis penelitian sejarah NU dapat dikatakan diwakilli oleh Choirul Anam yang menulis *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Hampir semua penulis mengenai NU selalu merujuk dan mengutip tulisan Anam ini. Dalam kategori histografi, Anam dapat dikatakan sebagai sejarawan NU dan kesenambungan tulisan sejarahnya perlu dilanjutkan oleh peneliti lainnya.

Buku ini selain menjelaskan sejarah NU dari proses kelahuran dan pertumbuan, peran para pendirinya, sistem nilai yang di lingkungan NU juga membahas keterkaitan NU dalam politik atau dunia politik praktis. Isi buku ini masih berkisar sekedar pemahaman langkah-langkah politik NU sebagai kajian yang berpisah dari kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan.[5]

Kategori penelitian politik merupakan kajian yang sangat menarik perhatian para peneliti. Buku Greg Fealy dapat di anggap mewakili dalam meneropomh situasi politik NU dari sejak zaman kolonial, masa kemerdekaan, orde lama dalam masa transisi menuju orde baru. Greg Fealy menulis buku *Ijtihaj Politik Ulama*, *Sejarah NU 1952-1967*. Dengan memakai pendekatan sejarah, buki ini memakai sejumlah perilaku politik para elite NU sejak keterlibatannya dalam politik praktis sampai awal orde baru.[6]

Kajian selanjutnya mengenai politik NU dibahas oleh Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara.* Buku ini dapa dikatakan sebagai kelanjutan dari penelitian Greg Fealy yang memperjelas alasan-alasan yang menyebabkan perubahan arah politik NU tahun 1984 dan usaha mengukur dampaknya pada tahun-tahun berikutnya.[7] Buku ini juga memakai pendekatan sjarah dalam melihat perubahan-perubahan politik NU dalam dekade perkembangan politik Indonesia.

Buku selanjutnya dapat disebutkan juga adalah buku Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan* yang merupakan hasil dari penelitian lapangan daerah Jombang Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukan potret sebuah bentuk hubungan antara tokoh ulama dengan politik dalam kasus lokal. Fokus penelitian yang

[5] Lihat Anam, *perkembangan...,* h.85

[6] Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*. (Yogyakarta: Lkis, 2003)

[7] Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara*, *Pencarian Isi, Bentuk dan Wawancara,* (Yogyakarta: Lkis, 1999).

dilakukan di "Kota Santri" Jombang memberikan ilustrasi kepemimpinan kyai secara umum dengan meusatkan perhatian pada aspek-aspek kultural dan politik kepemimpinan mereka. Buku ini mencermati konflik yang muncul karena pandangan politik kyai dapat melahirkan konflik langsung diantara pengikutnya. Pada sisi lain terkadang otoritas kyai untuk mempengaruhi masyarakat sesungguhnya juga terbatas.[8]

Tulisan-tulisan yang telah disebutkan di atas kelihatannya lebih mewakili corak pandangan perilaku politik para tokoh dan keterpengaruhannya terhadap para pengikut. Pendekatan sosiologis-antropologis yang dipakai oleh Endang misalnya lebih melihat gejala kepemimpinan karismatik yang di teima ole para santri terhadap perilaku para tokohnya dalam hal ini adalah kyai yang seakan-kan tanpa survival walaupun ada sudut perpecahan, namun perpecahan tersebut tidak disebabkan oleh pola "pertarungan" tokoh ulama.

Begitujuga tokoh politik dengan pendekatan sejarah *an sich* lebih mewarnai perubahan-perubahan orientasi politik dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. Pendekatan ini memperlihatkan perilaku politik berubah-ubah yang memunculkan kesan sikap oportunis, tidak konsisten dan terlalu cepat melakukan akomodasi-akomodasi. Walaupun dalam beberapa hal para penulisnya melakukan pembelaan kewajaran politik dalam beberapa hal dan sambil lalu menghubungkan dengan kaedah-kaedah fiqih yang diyakini, kerancuannya tetap akan terjadi apabila tidak di dekati secara mendalam terhadap nilai yang diyakini dan dipahami. Dalam hal ini perlu ditelusuri pemikiran strategi perubahan politik, karena organisasi NU mendasarkan diri atas nilai-nilai sosial-keagamaan, sedah barang tentu ia mendasari perjuangan atas pemahaman nilai-nilai keagamaan yang kemudian diterjemahkan sebagai kerangka dakwa politik atau lebih dikenal dengan *dakwah siyasah.*

[8] Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan,* (Yogyakarta: Lkis, 2004), h. 317

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan usaha menghindarkan imitasi dan daur ulang penelitian ini akan melihat strategi politik NU dalam pengembangan masyarakat Islam pasca Muktamar Situbondo tahun 1984 samapi akhir era orde baru.

E. Kerangka Teori

Salah satu persoalan yang harus diperjelas adalah terkait strategi NU yang belum di posisikan secara konprehensif dalam berbagai sudut pandang. Dalam mengartikan politik, para ahli setidaknya melihatnya menjadi dua hal; politik sebagai sebuah "makan-makan" dan politik sebagai sebuah "instrumen". Delam kasus pertama, politik diletakkan sebagai sebuah konsep yang digunakan untuk menciptakan harmoni masyarakat dan kebijakan sosial. Oleh karenanya ai biasa desebut sebagai ilmu politik atau politik teoritis yang mencapai berbagai bidang kajian.pada pengertian kedua, politk dipahami sebagai sebuah alat bagi sebuah intuisi untuk melegitimasi kekuasaan yang dimilikinya. Dalam hal ini, ia bisa juga disebut sebagai politik praktis.[9] Dengan demikian, konotasi plitik tidak hanya sebatas politik praktis, akan tertapi ia memiliki makna luas yang lebihuniversal dan teoritis, termasuk diantaranya beberapa strategi dalam mengembangkan masyrakat.

Dalam kancah dialektika historis atu teori *challange and response*,[10] dapat di tangkap bahwa dunia politik NU tidak sebatas politik praktis saja tetapi lebih mengaruh kepada politik yang

[9] Lihat Bertrand badei, dkk, "Introdiction to political science" dalam Bertrand badei, dkk,(ed)., *Introdiction to political science* (Los Angeles: SAGE Poblications, 2011), vol. 1, h, 11

[10] Teori mengenai dialektik historis merupakan teori yang di cetuskan Georg Wilhelm Freidrich hegel, selain itu Hegel juga dapat dikata penulis filsafat sejarah. Bukunya *The Philosiphy of History* dapat dikatakan merupakan karya yang cukup mewakili mengenai gambaran dunia klasik. Buku ini ikut membuka cakrawala menegnai peta sejarah pemikiran,keilmuan, dan wawasan dunia seperti dunia Timur. Membaca buku ini akan di ketahui seharah kehidupan manusia dari sejak klasik, pertengahan, dan modern. Untuk lebih jelasnya, lihat G>W>F Hegel, *Filsafat Sejarah,* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001), Teori *challange and response* merupakan teori yang meletakkan kerangka pemikiran pada suatu prinsip bahwa lahirnya sesuatu kultur tiada lain kecuali merupakan suatu jawaban terhadap keinginan dan kecenderungan masyarakat terhadap kultur tersebut. Arnold J. Toynbee merupakan pencetus ide tersebut Bulcunya *Mankind and Motlter Earth, A Narrative History of the World* mempertegas sejarah perjalanan kultur manusla, bisosfir-biostir yang melewati kehfdupan. manusia dari. berbagai macam. bangsa dan lengkap dengan tegas poriodesasinya. Untuk lebih jelasnya mengenai hal ini, lihat Amorld To)'Dbcc,*Sejaruh UmaJ Mtzm1Sia, Uraian Analisis, Kronologis, Naratif, dan Xomparalif.* (Yogyalcarta: Pustaka Pelajar.2006).

sifatnya universal, perpolitikan NU dapat di gambarkan sebagai sebuah bentuk piramida terbalik. Ilustrasi piramida terbalilc ini dimulai dengan asumsi bahwa NU awalnya adalah postulat yang menekankan visiriya kepada paham *ahlussunnah wal jama'ah*, kemudian paham ini dijabarkan dalam beetuk kesadaran spiritual, gerakan aktual seperti sosial dan ekonomi terformat dalam kesadaran politik sesuai dengan sejarahnya. Bentuk kerucut dalam segitiga ini dinamakan dengan cita-cita ideal atau seing disebut dengan Khittah 1926.

Perjalanan politik NU mengalami konvorgensi dan hampir tidak dapat clihentikan selama dekade 1955-1982 terlibat dalam politik praktis, Keterlibatan ini akbatnya disadari bahwa terlalu banyak menceburkan organisasi dalam dunia politik praktis atau katakanlah partai politik akan membawa damapak kepada hilangnya semangat atau spirit keagamaan yang dicita-citakan semula, Tetapi suatu hal yang patut dipahami di sini bahwa nilai ideal awal keterlibatan NU dalam politik berkaitan dengan cita-cita politik umat Islam.[11] Namun gambaran cita-cita ini melampani arus cita-cita yang sebenarnya, dalam kuncup piramida terbuka kondisi ini dapat digambarkan politik praktis NU dekade 1950-1968. Politik praktis ini terus berlangsung hingga awal orde baru, awal orde baru yang semulanya merupakan bagian dari cita-cita perubahan komponen bangsa untuk membangun cita-cita politik agar lcbih nyata sebagaimana yang sudah lama diserukan oleh Moh. Hatta, orde baru mulai menunjukkan sifat represifitas politik terhadap umat Islam dan mengaitkan cita-cita politik Islam dengan kekacauan-kekacauan masa lalu yang dianggap mengganggu stabilitas bangsa. Sebagai

[11] Sebagaimana organasasi yang dirumuskan atas cita-cita ideal keislaman, NU mempunyai kaidah-kaidah pokok dalam memperjuangkan nilai ideal Islam. Agar gerak ril menjadi nyata dalam konsep politiknya, NU mendasarkan kaidah-kaidah gerakan politiknya atas kaedah ushul fiqh dengan llma kaedah pokok atau lazim disebut dengan al-qawa> 'id al- khams al-kubra>.11 Rumusan lima kaidah tersebut adalah; perbuatan tergantung niatnya (al-umu>r bi maqashidiha), keyakinan tidak hilang karcua keraguan (al-yaqz>n la yuza>lu Iii al-syak), bahaya dihilangkan, tidak ada bahaya atau tidak ada yang membahayakan (ad}-d}araru yuza>ila>dara>r wala> d}ira>r), kesulitan dapat memberikan kemudahan (al-masyaqqah tajlib at-taisir), sesuatu yang menjadi kclbiasaan diakui (al-'a>dah muh}akkamah). Lima kaidah pokok ini dapat dikatakan sebagai dasar pemikiran dakwah (fiqh dakwah) politik NU dalam menjalankan aktivitas politik. sepanjang dekade sejarah bangsa Indonesia. Dinamika dan pcrubahan politik NU dapat diamati melalui prinslp-prinsip dalam lima kaidah pokok tersebut. Lima kaidah tersebut dapat dianggap sebagai modal politk NU dalam menjalankan pemberdayaan politik umat Islam secara umum.

bagian dari entitas umat Islam, NU termasuk bagian yang menghadapi sifat represifitas orde baru ini, politik konfrontasi tidak dapat dan sangat merugikan bagi NU sendiri. Dalam kerangka piramida terbuka ini, posisi NU berada dalam siklus politik konfrontasi dengan orde dan berlangsung dari sejak tahu 1968-1982.

Kesadaran NU untuk menata kembali perjuangan organisasinya menampakkan peluang lebarnya piramida terbuka. Dalam keadaan ini posisi politik praktis yang semulanya ruempunyai kesan berhadap-hadapan (versus) atau oposisi binner yang sebaresaya banya dimiliki oleh partai atau kaum politik tidak 1agi menjadi pusat perhatian NU. NU semakin lenggang dan terbuka dengan wawasan lain dan melebarkan kepakan, sayapnya dalam melakukan pemberdaan umat manusia, Muktamar Situbondo yang mclahirkan keputusan formal organisasi untuk kembali ke khittah membuka peluang program-program dalam NU. Terbukti bahwa program-program tersebut menarik dianalisis dalam kerangka pengembangan masyarakat Islam yang merupakan inti dasar khittah Nu sendiri. Dengan demikian kapaknya sayap NU dapat di jangkau peran dirinya dalam membangun kiprah uman untuk pengembangan spiritual-moral, bidang ini merupakan sebuah isu penting dalam orde baru dan hampir dapat dipastikan kejatuhan rezim ini secara formal pada tanggal 21 Mei 1998 adalah akibat dari dangkalnya moral-spiritual secara hakikat, walaupun orde baru dalam waktu-wakru terakhir menunjukan sebuah ikhtiar memperbaiki kualitas spiritual-moralnya namun kebanyakan yang tertangkap adalah sebagai formalitas sementara dan di bumbui oleh unsur politik.

Pengembangan selanjutnya yang menarik diamati dalam kepadan sayap organisasi ini adalah gairah intelektual mudah NU yang mulai bergerak secara transformatif, bergerak dari dunia pesantren menjadi aktivisme gerakan kaum muda. Pertumbuhan intelektual ini tidak lepas dari pengaruh Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur, Gus Dur oleh banyak pengamat dijadikan indikator sebagai lokomotif perkembangan intelektual anak-anak muda NU.[12]

[12] Mengenai peran Abdurrahman Wahid sebagai lokomotif NU dalam pengembangan masyarakat Islam akan dibahas secara perinci dalam tesis ini. Sebuah tulisan biografi Abdurrahman

Perkembngan ekonomi umat kelihatannya suatu hal yang amat keras dipikirkan oleh NU, tetapi sulit sekali di terjemahkan dalam kebijakan-kebijakan organisasi ini. Namun upaya-upaya yang di pikirkan dalam masalha ekonomi jelas menunjjukan bahwa upaya memecah persoalan ekonomi umat merupakan salah satu titik yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sebuah dinamika alternatif ekonomi umat di Indonesia. Analisis program NU pasca Muktamar NU dalam bentuk piramida terbalik dapat digambarkan sebagai berikut.

Dalam lingkaran teori perubahan, siklus perubahan orientasi, konsep, strategi politik NU dapat di gambarkan sebagai rangkaian tanggapan terhadap problem-problem yang dihadapi umat. Watak primer keagamaan NU lahir atas respon terhadap kolonialisme dan pertimbangan menjaga kemurnian Islam yang diyakini. Karakteristik politik masa orde lama merupakan tuntuan situasi atas keinginan merepakan idealisme syariah Islam. Masa konfrontasi dengan orde baru merupakan dilema menghadapi rezim ini yang mengiginkan stabilitas tercipta secara baik mengembalikan program kepada khittah awal adalah bentuk dari antitesis dalam upaya menjaga organisasi dari gesekan-gesekan keras dari rezim. Program penyesuaian-penyesuaian juga terus dilakukan sampai saat ini.

Dalam formasi mengembalikan hakikat khittah NU kepada porsi awal, tahapan upaya pengembangan masyarakat merupakan sebuah potret yang perlu di perhatikan dalam kajian ini. Luasnya garapan aspek pengembangan masyarakat Islam secara logis perlu penggarapan secara bertahap. Dalam rentang waktu tahun 1984 sampai dengan tahun 1999 telah menunjukan perkembngan yang berpariasi dalam hal strategi politik dalam pengembngan masyarakat dalam berbagai bidang. Tahapan disini akan di analisis dalam periodik tahunan sebagai suatu kebiasaan analisis program. Dengan demikuan ada kemungkinan tahapan perkembangan dapat di gambarkan. Tahapan pertma, periode tahun 1984-1989 merupakan strategi konsilidasi internal NU untuk melihat sejumlah

---

Wahid telah ditulis oleh Greg Barton, *Biografi Gus Dur, The Auther Biografhy of Abdurrahman Wahid,* (Yogyakarta: Lkis, 2006). Buku ini secara jelas memaparkan mengenai latar belakang Abdurrahman Wahid, pemikiran danlangkah- danlangkah politiknya.

aset-aset penting organisasi yang terabaikan akibat panjangnya masa politik praktis dan konfrontasi politik. Strategi hubungan dengan negara di perbaiki dalam bentuk upaya penerjemah kembali atu redefinisi soal hubungan agama dan negara. Pemberdayaan masyarakat yang sangat memungkinkan pada saat ini adalah pemberdayaan mental-spiritual dengan upaya mengkampanyekan nilai-nilai Islam inklusif.

Dalam periode 1989-4994, strategi yang diterapkan kemungkinan adalah "menjaga jarak" dengan kekuasaan, dalam hal ini suasana politikan NU. Melebar dan mulai menunjukan arah perubahan., kader-kader NU bisa terlibat dalam partai-partai orde baru. Walaupun demikian, nampak jelas bahwa NU sudah benar-benar menjadi organisasi indipenden dalam politik. Kemandirian menjadi isu sentar sebagai strategi kemandirian dan upaya pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya tergantung dengan negara. Karena aspek kemandirian membutuhkan sumber daya manusia (SDM), maka dalam fariabel pengembangan yang dilakukan adalah pemberdayaan intelektual dan budaya dan pemberdayaan ekonomi umat.

Periode 1994-1999 dapat dikatakan menerapkan strategi kemandirian denagn memperkuat tawar masyarakat dalam berhadapan dengan kekuasaan dua isi pemberdayaan pada saat ini adalah masyarakat sipil (*civil society*) dan upaya menyadarkan masyarakat untuk bersiap menerima sistem multi partai (*party multy party*) dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, isu pemberdayaan terpola dalam pengembangan masyarakat sipil lewat kesadaran pluralitas partai politik. Secar internal, strategi NU menyambut reformasi adalah memilih tugas secara terbelah dan tugas antara tugas-tugas sosial keagamaan. Tugas politik menjadi tugas partai yang membentuk NU yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan tugas sosial keagamaan menjadi tugas NU secara organisasi.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kualitatif yang menggunakan pradigma heuristik dan hermeneutik serta bagian dari kualifikasi metodologi penelitian post-positivisme dan fenomenologis-interpretatif.[13] Untuk membongkar strategi politik NU pada masa 1984-1998, metode historis merupakan metode yang cocok dalam penelitian ini. Dengan metode ini diharapkan dapat mencari nilai-nilai yang di terapkan dalam strategi perubahan politiknya pada masing-masing zaman.

Upaya merekonstruksikan masa lampau dari objek yang di teliti itu di tempuh melalui metode sejarah. Pengumpulan data atau sember sebagai langkah pertama kali, dilangsungkan dengan metode penggunaan bahan dokumen.[14] Strategi perubahan tersebut dapat dilihat dalam teori spiral sejarah berikut :

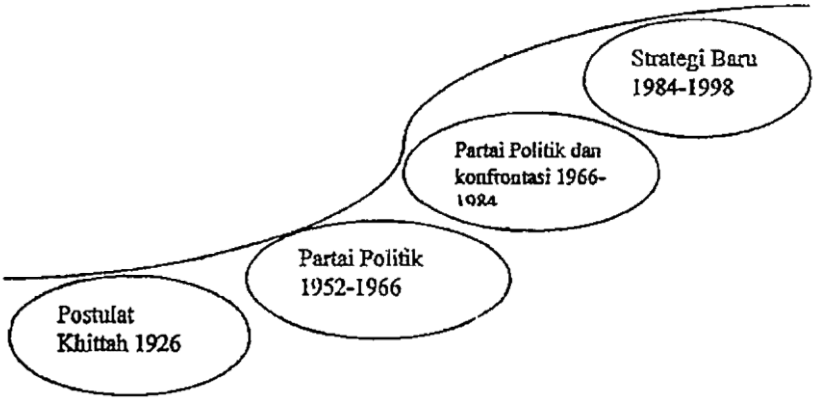

Teori spiral sejarah memberikan makna perjalanan sejarah yang memberikan unsur unsur pengulangan sejarah kejadian, namun kejadian yang berulang tersebur tidaklah bersifat sama dengan waktu-waktu sebelumnya. Dalam kelindan waktu pasti keinginan organisasi NU kembali menggerakan konsep khittah tidaklah persis sama dengan khittah yang berlangsung pada tahun

[13] Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), h. 17

[14] Mengenai metode ini lihat masalahnya Sartono Kartodirjo, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen", dalam Koentjaraningrat, *Metode- Metode Penelitian Masyrakat,* (Jakarta:1989), h. 45;Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah,* (Yogyakarta: Banteng, 1995), h. 94-97.

1926 dan beberapa tahun sesudahnya, karena jelas ruang sejarah terkait waktu dan kondisi pasti berbeda.

Untuk membongkar ruang spiritual tersebut, penulis menggunakan interprestasi dalam membaca dokumen-dokumen yang tersedia terkait dengat produk program NU setelah Muktamar NU di Situbondo. Hal ini penulis lakukan karena mengingan metode sejarah merupakan seperangkat asas atau kaidah yang sistematis untuk secara efektif mengumpilkan sumber-sumber, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis hasil yang dicapai, pada umumnya dalam bentuk tertulismengenai rekaman dan peninggalan masa lampau. Secara lebih singkat metode tersebut memiliki tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.[15]

Karena karya ini adalah penelitian literatur, maka proses pengumpulan data (*heuristic*) dilakukan dengan bahan dokumen melalui pencairan buku-buku, jurnal, makah, dan lain-lain di katalog beberapa perpustakaan, dan mencatat sumber terkait yang dapat digunakan dalam studi-studi sebelumnya. Dengan demikian selama proses pengumpulan sumber dilakukan semaksimal mungkin dan simultan mengingat tidak tertutup kemungkinan banyak sumber yang terus-menerus berkurang, tetapi pada saat yang sama juga mengurangi sumber-sumber yang sudah tidak relevan lagi terhadap politik bahasan.

Selain itu di kaji juga buku-buku yang berkaitan, berita-berita koran, serta opini yang terkait dengan NU pada masa tersebut. Seumber-sumber itu kemudian diuji keaslian (*authenticity*) dan kesanihannya (*credibility*) melalui kritik ekstern dan intren sumber. Setelah dari analisis, disintesis menjadi fakta-fakta sejarah mulaipendekatan teori di atas dalam tahap interpretasi ini diusahakan untuk bersikap objektif, sehingga tahap eksplanisi sejarah (*historigraphy*) dapat di capai penulis yang kronologis dan disajikan menurut topik-topik penting dari setiap perkembangan objektif penelitian.

[15] Nugroho Notosusanto, *Norma-Norma dasar dalam penelitian sejarah* (Jakarta:Depanhakam, 1971), h.35.

G. Sistematika Pembahasan

Karya ini disusun dengan sistematika berikut ini. Aspek pertama yang dijelaskan adalah terkait dinamika NU dalam kontesk orde baru, mencakup politik orde baru terhadap Islam, hubungan antar NU dan orde baru yang terkesan antagonistik sampai strategi NU dalam merubah sikap politiknya secara kritis, selanjutnya, aspek utama yang menjadi bahasan penelitian adalah terkait tiga macam strategi politik NU semenjak organisasi tersebut menyatakan diri untuk kembali kepada khittah 1926.

BAB II
NU, ORDE BARU DAN RE-ORIENTASI STRATEGI POLITIK

A. Politik Orde Baru Trehadap Islam

Tonggak pengertian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto merupakan pergantian ke rezim militer. Orde Baru tidak menginginkan militer *back to barrack*, militer telah melakukan penetrasi dalam aspek kehidupan sosial-politik baik tingkat pusat maupun daerah menikmati kedudukan politik tingkat pusat mauoundaerah menikmati kedudukan politik baik di eksekutif, legislatif, dan yuikatif, menurut catatan Mac Dougall seperti yang di kutip oleh Abdul Aziz Thaba, tahun 1982-1986 militer menguasai 60% jabatan pembantu dekat presiden, 38% menteri, 67% sekertaris jendral, 67% inspektur jendral, 20% direktur jendral. Tahun 1980, 70% Gubernur adalah militer.[16]

Kekuatan Islam pilitik yang di anggap Soeharto sebagai fanatisme Islam segera dicari kekuatan penyeimbang, kekuatan PNI di bersihkan dari unsur-unsur masa lalu. Soeharto tidak melarang parta berhaluan ideologi nasionalis sekuler, tetapi membersihkan PNI dengan mengatur kongres PNI sehingga teman lamanya terpilih

[16] Abdul Aziz Thaba, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde* Baru (Jakarta:gema insani press), h. 194-195

sebagai pimpinan PNI .[17] Sejarawan M.Cricklefs mencatat tentang banyaknya personal militer yang ingin memusnahkan apa pun yang berhubungan dengan Orde Lama, mereka berharap bisa menghancurkan PNI. Tetapi Soeharto pernah memilih untuk memperlemah dan mengendalikan partai ini. Sitor Situmorang, pemimpin intelektual PNI dan bekas sekutu Lekra dipenjara pada tahun 1967 dan tahanan hingga tahun 1975 tanpa pemeriksaan pengadilan. Para komandan daerah di sumatera, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan melarang PNI untuk smentara. Tetapi partai itu bertahan karena Soeharto memang ingin mempertahankannya. Islam politik garis tradisionalis seperti partai NU tidak lepas dari tekanan dan intimidasi. Labih lanjut, Ricklefs mencatat bahwa pemimpin NU juga dikecam, tetapi kelompik ini kurang memerlukan perlindungan Soeharto karena basis sosialnya yang lebih kuat di pedesaan. Banyak elit Orde Baru percaya bahwa NU tidak akan menimbulkan masalah selama kepentingan agamanya tidak terancam.[18]

Pemerintahan menolak Islam politik dan partai-partai politik yang bercorak ideologis-politisi. Sesuai dengan strategi pembangunan yang menekankan pembangunan ekonomi, sendangkan pembangunan politik sernata-mata bertugas sebagai penunjang dengan menciptakan stabilitas politik. Atas dasar ini pemerintah Orde Baru mulai melakukan marginalisasi peranan agama dalam struktur politik. Isu tentang Negara Islam dan Piagam Jakarta dalam Sidang Umum MPRS 1968 dipandang sebagai "teror keagamaan" dan Soeharto menegaskan akan menindak setiap usaha melegitimasi masalah agama untuk maksud-maksud politik yang tidak pada tempatnya.[19] Pertimbangan ini mendorong Orde Baru menolak rehabilitasi Masyumi dan keterlibatan tokoh-tokohnya dalam arena politik. Tak kalah pahitnya mantan Wakil Presiden pertama RI, Moh. Hatta mengalami nasib yang sama ketika dirinya berrnaksud mendirikan partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII). Menyadari kondisi tersebut, tokoh Masyumi, M. Natsir memilih

[17] M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* 1200-2004 (Jakarta: Serambi, 2005), h. 571
[18] *Ibid,* h. 576-579
[19] *Ibid.,* h. 244

keluar dari kegiatan politik praktis dan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). M. Natsir mengembangkan empat konsep pemikiran dakwahnya Iewat DDII tersebut. Empat konsep tersebut adalah pengembangan metode dan tehnik dakwah; dakwah dalam bidang sosial-ekonomi; kerjasama antar lembaga pesantren dan madrasah dalam meningkatkan pendidikan; kerjasama antar Iembaga-lembaga Islam dan organisasi Islam serta tokoh-tokoh Islam.[20] Orde Baru memandang badan ini sudah tepat bagi Natsir, politik dianggap tidak cocok lagi baginya.[21] Soeharto sendiri sambil menunjukkan isyarat menyetir mobil menyatakan bahwa sebaiknya orang tua berada di belakang saja, biarlah anak muda yang berada di depan. Kelakarnya ini tentunya langsung dialamatkan kepada Natsir dan koleganya.[22] Sikap Orde Baru terhadap M. Natsir menurut Deliar Noer kurang respek dan kurang diterima, malah boleh dikatakan sampai akhir hayatnya. Menurut Noer, Natsir berperan dalam memuluskan hubungan pemerintah Orde Baru dalam menyelesaikan konfrontasi dengan Malaysia. Karena Natsirlah Orde Baru tambah dipercaya oleh pihak Arab dan Timur Tengah. [23]Tentang jasa M. Natsir, Anwar Harjono menulis salah-satunya:

> "Mohammad Natsir adalah sumbangan umat Islam bagi utuhnya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRl) melalui musyawarah tanpa geiolak sosial. Berkat Mosi Integral Natsir, kembailnya Republik Indonesia Serikat (RlS) ke NKRI berlangsung mulus dalam suasana damai. Tidak setetes darah pun yang tertumpah dan tidak satu pihak pun yang merasa dipermalukan."[24]

[20] B.J Boland, *The Struggle...*, h,202
[21] M.C Ricklefs, *Sejarah...*, h. 578
[22] Kujang Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khiaah* 1926, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), h. 98

[23] Deliar Noer, *Aku Bagian Umat, Aku Bagian. Bangsa,* (Jakarta: Mizan, 1996), h. 891
[24] Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa, Meno/eh ke Belakang Menatap Masa Depan,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 11. 56

Selain membiarkan Natsir dengan DDII-nya, Orde Baro juga berusaha menunjukkan rasa simpati terhadap umat Islam, tahun 1975, pemerintah membantu mendirikan MUI Organisasi ulama ini diharapkan membantu pemerintah dalam menjelaskan kebijakan kebijakan program pembangunan nasional dalam bahasa agama. MUI menjadi jembatan aspirasi dan kepentingan umat Islam terhadap eksekutif dan legislatif. MUI juga memberikan saran keagamaan dan pendapat mengenai hukum kepada pemerintah, legislatife, eksekutif, dan Mahkamah Agung agar tidak menyimpang dari syari'at dan ajaran Islam. Dengan kata lain, MUI ikut memberikan perran dalam menjembatani kesenjangan antara umat Islam dan pemerintah dan menjadikan keduanya lebih akrab.[25] Kemudian mereka yang pulang dari haji, para alumninya diizinkan membentuk Badan Koordinasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (Bakor Il'Hl) dengan dr. H. Sulastomo, SH sebagai ketua, hal ini terjadi bulan Maret 1990.[26]

Selain itu, sikap lunak lain ditunjukkan dengan penunjukkan identitas pribadi Soeharto sebagai warga Negara yang beragama Islam dan bukan sebagai Presiden pada tanggal 17 Februari 1982 memprakarsai berdirinya YAMP (Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila) dengan dirinya sendiri sebagai ketua. Sampai dengan bulan Juli 1990, YAMP telah berhasil membangun hamper 400 masjid dengan berbagai ukuran di berbaga wilayah Negara ini, yang masing-masing menghabiskan dana antara 110-130 juta rupiah. Untuk menggali dana, setiap pegawai negeri dan anggota ABRI, menurut jabatan masing-masing dianjurkan ntuk menyumbang uang dalam jumlah tertentu kepada YAMP setiap bulannya. Pada akhir 1991, YAMP telah berhasil mengumpulkan total dana sebesar 83 Miliyar rupiah.[27]

Ketegangan politik antara umat Islam dan pemerintahan Orde Baru pada masa awal terjadi dalam bentuk hubungan yang bersifat antagonistik.[28] Ketegangan ini dipicu oleh Komite Pekersa SU MPR

[25] Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila;* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999),, h. 273

[26] *Tempo*, No. 5, 31 Maret 1990

[27] Faisal Ismail, *Ideologi...,* h. 274

[28] A. Aziz Thaba, *Islam dan...,* h. 240

1973 yang diketuai Daryatmo telah menyusun draft rencana GBHN. Dalam draft tersebut muncul persoalan-persoalan sensitive bagi umat Islam, yaitu: Menggantikan pelajaran agama menjadi pendidikan Moral Pancasila dalam semua tingkatan sekolah umum; Anggaran BeJanjan Negara 1973/1974 untuk urusan-urusan keagamaan diturunkan dari Rp.1.226 juta menjadi Rp.800 juta; Persoalan masuknya aliran kepercayaan dalam GBHN sebagai bagian dari agama resmi yang kedudukannya setingkat dengan agam lainnya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Mempertimbangkan dampak politiknya, usul FKP tentang penghapusan pelajaran agama tidak mendapat respons, bahkan beberapa anggota FAERI menyatakan ketidaksetujuannya secara terbuka. Sebaliknya, PPP (fusi dari partai-partai Islam: Parmusi, NU, PSII, dan Peti pada tanggal 5 Januari 1973) mengurungkan usulan rancangan tentang kewajiban pendidikan agama di sekolah-sekolah.[29]

Protes terhadap aliran kepercayaan secara politik resmi disalurkan oleh anggota-anggota PPP dengan melakukan *walk out* dari MPR ketika usulan tersebut disahkan, Sikap ini dilakukan atas saran KH. Bisri Syansuri yang mengkhawatirkan umat Islam terjerumus dalam kemusyrikan (*polytheisme*). Meskipun mendapat protes keras dari FPP, usulan tentang aliran kepercayaan disabkan dan dimasukkan dalam GBHN.[30] Perlu disampaikan di sini bahwa Umat Islam secara umum dan *fttifaq* menolak aliran kepercayaan tersebut, Muhammadiyah rnelangsungkan seminar Majelis Tarjih di Bandung pada tanggal 24-Z7 Desember 1970 yang secara khusus membahas masalah kebatinan. Makalah Hamka yang disampaikan dalam seminar tersebut pada intinya menolak aliran kebatinan.[31]

Kontroversi aliran kepercayaan bersambut gayung dengan kontroversi perkawinan yang diajukan pemerintah tanggal 16 Agustus 1973. Sebulan sebelum RUU tersebut diajukan, timbul reaksi keras dari segala lapisan masyarakt muslim. Khutbah di masjid masjid, ceramah, pengajian, tulisan-tulisan di koran, demontrasi-

[29] *Ibid,* h. 254
[30] Faisal Ismail, *Ideologi....,* h. 157
[31] Abdul Aziz Thaba, *Islam...,* h. 254

demontrasi, dan berbagai pernyataan ormas Islam pada intinya semua menolak RUU itu yang dianggap bertentangan deagan ajara Islam. Semua ulama, baik dari kalangan tradisional maupun modernis, dari Aceh sampai Jawa Timur menolak RUU tersebut.[32]

Menurut Deliar Noer, reaksi terhadap rencana RUU perkawinan ini memiliki persamaan dengan zaman Belanda pada tahun 1930-an itu protes-protes dilancarkan oleh kalangan Islam dengan sangat gencar terhadap rencana Belanda tersebut, sehingga Belanda akhirnya terpaksa mencabut ordonasi yang telah di sampaikan. Pada tahun 1973, pemerintah siap dengan rencana undang-undang perkawinan, tetepi kerena protes-protes yang yang juga gencar, malah lebih hebat dari proses tahn 1930-an, rencana tersebut diubah sedemikian rupa sehingga tuntutan kalangan Islam dipenuhi.[33] Reaksi yang cukup keras dari umat Islam membuat pemerintah melakukan lobiying, lobi tersebut membuahkan hasil dengan dicoretnya pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Walaupun UU ini menganut asas monogami, tetapi dijiwai oleh hukum-hukum agama. Pasal-pasal krusial yang bertentangan dengan ajaran Islam dihapus seperti pasal 11 mengenai pertunangan; pasal 14 mengenai tata cara gugatan perkawinan; dan pasal 62 mengenai pengangkatan anak.[34]

Prahara umat Islam kembali terjadi ketika pemerinrah mengusulkan ke DPR tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4), sebuah indoktrinasi Pancasila model Orde Baru yang banyak menelan biaya. Secara berani PPP melakukan *walk out* dari sidang MPR Pemerintah melihat janggal sikap PPP dan bahkan Soeharto secara emosional mengeluarkan pernyataan bahwa kelompok penentang P4 Merupakan sikap dari kelompok yang tidak setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Presiden Soeharto segera mengeluarkan pernyataan bahwa militer tidak ingin mengubah pancasila dan UUD 1945. Jika ada usaha-usaha mengubahnya, ABRI akan menanggapinya dengan kekuatan senjata.

---

[32] *Ibid,* h. 256

[33] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942,* (Jakarta: LP#ES, 1980), h. xix

[34] Abdul Aziz Thaba, *Islam...,* h. 269-261

Soeharto bahkan memperkenalkan ide "culik" sebagai cara untuk melindungi Pancasila dan UUD 1945.[35]

Tuduhan Soeharto secara emosional bahwa aksi *walk out* para pimpinan PPP merupakan tanda keraguan mereka terhadap kebenaran Pancasila tidak mendapat persetnjuan dari masyarakat, bahkan tokoh-tokoh Islam menilai bahwa sikap politik PPP adalah bagian dari prates berdemokrasi dan dapat dibenarkan serta dilindungi oleh Pancasila dan UUD 1945.

Ketua Umum Muhammadiya saat itu, KH. A.R. Fachruddin, memberi reaksi cepat dengan mengatakan bahwa *walk out* yang dilakukan PPP dilakukan bukan dalam rangka anti-Pancasila, tetapi dalam rangka demokrasi. Menurut Fachruddin, Pancasila tidak harus selalu berkata "ya" kepada kemauan pemerintah. Senada dengan Fachmddin, Wakil Ketua Umum NU, KH. Anwar Musaddad juga menanggapi penilain Soehato. Musaddad mengatakan bahwa *walk· out* FPP dar sidang MPR merupakan hak untuk mengekpresikan pendapat-pendapat dan sepenuhnya dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian keberatan PPP atas pengesahan P4 tidak bisa clivonis sebagai keraguan umat Islam teerhadap Pancasila apalagi anti Pancasila.[36]

Kritik akademis tentang P4 datang dari Deliar Noer, seorang ilmuan yang mepersoalkan arti penting sosialisasi nilai-nilai Pancasila melalui pelaksanaan penataran P4.[37] Menurut pendapat Noer, dalam masyarakat manapun, ideologi hanyalah dituangkan dalam prinsipnya saja Sedangkan Pancasila sebagai ideologi negara akan diterima secara luas hanya jika uraian atau susunannya tetap dalam garis besar, mcnguraikan ideologi secara rinci akan

[35] *Ibid,* h. 161

[36] Faisal Ismail, *Ideologi.....,* h. 161-162

[37] Deliar Noer wafat pada Rabu, l0 Juni 2008 dalam usia 82 tahun. Menurut catatan sejarahwan Taufiq Abdullah, Noer merupakan aktifis yang tenang, mempunyai sifat kritis, menjadi aktifis kemahasiswaan dan keislaman, ihnuan, pendidik, cendikiawan, politikus, mubaligh, dan lain-lain. Menurut taufiq, tanpa disadari Noer, ia adalah ilmuan politik pertama, disertasi PHD-nya adalah *The Muslim odemist Movement in Indonesia 1900-1942* yang kemudian diterjemahkan dalam bahsa Indonesia, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942.* Noer memaparkan otobiografinya *Aku Bagian Umat, Aku Bagian Bangsa.* Dalam buku otobiografinya ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai "dialektika" dirinya sejak dipecat dari dosen USU Medan masa Orde Lama, diberhentikan sebagai Rektor lKIP Jakarta pada masa Orde Baru, dan mendapt suakan kerja ke Australia. Salah satu penelitian monumentalnya dalah *Mohammad Hatta: Biografi Politik* dan *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965.* Untulc lebih jelasnya Jihat Taufiq Abdullah, "Perginya Pendamai Santun", dalam majalah *Tempo,* edisi 23-29 Juni 2008, h. 121

mengurangi kesetiaan penganutnya, karena ada berbagai pendapat yang berbeda di kalangan rakyat, yang semuanya menuntut untuk diakui dan dimasukkan dalam uraian ideologi tersebut. Hal ini dapat menimbulkan konflik di kalangan rakyat, yang jika diredam pemerintah melalui kekuatan senjata, kekerasa, penyensoran atan penjara bukannya dengan persuasi dan kcnsultasi akan mengganggu keharmonisan dan ketenangan hidup rakyat.[38]

Kontroversi P4 bagi umat Islam kelihatannya tidak memperlihatkan sikap yang lebih radikal dalam merespons kembali kebijakan Orde Baru mengenai asas pancasila bagi partai politik dan ormas, kecuali Pelejar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO dan kelompok petisi 50 di mana tokoh islam Masyumi dan ketua DDII, M. Natsir bergabung dalam kelompok tersebut. Ormas Islam lain merespons dan menerima dengan sikap polotik dan argumentasi masing-masing.

Pemerintah dan pendukungnya memberika argumentasi penerapan Pancasila sebagai asas tunggal bagi partai-partai politik akan mendorong setiap partai supaya melakukan perubahan ke arah berorientasi program dan tidak lagi berdasarkan orientasi ideologi. Dengan demikian secara perlahan dan sedikit pemaksaan, Orde Baru sebenamya Memperkenalkan ideology pragmatism atau dengan bahasa lain developmentalisme atau kapitalisme malu-malu. Semua bentuk kegiatan partai politik dan ormas diharapkan mengarah ke sana dan umat Islam tentunya mempunyai kecerdasan dan sikap sendiri terhadap kebijakan Orde Baru dan menerimanya dengan strategi dan dinamika yang disepakatinya masing-masing.

Masalah asas tunggal membuat aktifis PPP dan PDI harus mendefinisikan ulang identitasnya dalam merespons kebijakan pemerintah. PDI tidak terlalu sulit menerima Pancasila sebagai asas tunggalnya karena basis ideologinya tidak bersifat keagamaan. Sejauh menyangkut PPP, undang-undang baru tentang asas tunggal merupakan isu yang sensitif karena partai ini harus membuang penyebutan kata Islam sebagai asas dan menggantikannya dengan Pancasila.

[38] Faisal Islamail, *Ideologi...,* 169-170

Gagasan pemerintah menetapkan pancasila sebagai asas tunggal ditanggapi Muhammadiyah pada sidang Majelis Tarjuh (forum tertinggi kedua setelah Muktamar) pada bulan Mei 1983, yang menghasilkan tiga keputusa: Pertama, Muhammadiyah setuju memasukkan Pancasila dalam AD/ART-nya tanpa mengubah kehadiran keberadasn asas Islam, kedua karena persoalan Pancasila sebagai asas tunggal merupakan masalah nasional bagi Muhammdiyah, maka harus dihadapi oleh pengurus pusatnya dalam skala nasional; karenanya, pengurus di tingkat regional di bawahnya tidak diperbilehkan mengeluarkan berbagai pendapat atau menerima berbagai sikap yang terkati dengan masalah ini, Ketiga, pembahasan mengenai masalah ini akan dilakukan dalam Muktamar ke-41 yang akan datang. Sikap awal Muhammadiyah terhadap isu ini adalah sebagai berikut: Pertama, Mubammadiyah dilahirkan ke dalam Islam, tanpa itu organisasi ini tidak mungkin menejadi lebih Muhammadiya. Kedua, Paricasila tidak menjadi masalah bagi Muhammadiyah, karena pemimpinnya, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Muzakkir dan Kasman Singodimedjo, berpartisipasi dapam perumusan. Pancasila dan menerimanya (sebagai asas dan ideologi nasional negara) tanggal 18 Agustus 1945: Ketiga, berdasarkan fakta tersebut, Muhammadiyah dapat menerima Pancasila dalam AD/AR.T-nya tanpa mengubah asas Islam yang telah digunakan sejak lama.

Muhamrnadiyah menggunakan sikap hati-hati dalam menerima Pancasila sebagai asas tunggal, karena persoalan ini dianggap berat dan menunggu pengumuman pemerintah tentang UU Keormasan Muhammadiya memutuskan menangguhkan Muktamarnya yang ke-41 yang direncanakan berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah bulan Februari 1984. Kurang lebih dua tahun kemudian, Muktamar akhimya diselenggarakan di Surakarta dari tanggal 7-11 Desember 1985. Atas undangan Pengurus Pusat Muhammiyah, Presiden rnenghadiri Muktamar dan memberikan pidato pembukaan dalam Muktamar di Surakarta. Muhammadiyah secara resmi menerima Pancasila sebagai asas tunggal.[39]

[39] Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni don Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif ls!am don Pancasila,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 245-248

Sikap umat secara mayoritas terhadap penerimaan asas tunggal menimbulkan kelunakan dalam beberapa hal terhadap umat Islam. Seperti yang dicatat Faisal Ismail, beberapa hal tersebut terkait dengan masalah perbakan manajemen haji, Perpindahan gedung Departemen Agama RI, dibolehkannya siswi memakai Jilbab di sekolah umum, dan program-program lainnya.

Menurut Faisal Ismail, pemerintah selalu memperhatikan kemajuan infrastruktur dan administraei haji. Perhatian ini selalu ditampilkan dalam GBHN sebagai salah satu kebijakan nasional yang paling penting, babkan laporan Manawwir Sjazali Menteri Agama saat itu, pemerintah Arab Saudi mernandang administrasi haji pemerintah Indonesia adalah salah satu yang terbaik bila dibandingkan dengan negera-negara muslim yang lain. Lebih lanjut, Faisal Ismail menyebutkan gedung sebelumnya milik Kodam dan menjadi tempat yang Strategis dengan Masjid Istiqlal, Jakarta. Selain itu, kebijakan MTQ Tingkat Nasional yang menghabiskan dana miliyaran rupiah dan diselenggarakan di privinsi yang berbeda-beda dan secara resmi dibuka oleh Presiden, sejak akhir 1980-an. Pelajaran Bahasa Arab ditayangkan kepada umat Islam serninggu sekali melalni televisi pemerintah. Tahun 1991 berlangsung festival kebudayaan Islam atau dikenal Festival istiqla dan direspons oleh banyak pengunjung yang hadir Lebih penting lagi, festival ini berlangsung di kompleks masjid istiqlal jakarta dan di anggap sebagai satu-satunya festival kebudayaan Islam terbesar dalam sejarah islam di Indonesia.[40]

Selain hal di atas, pemerintah berupaya keras memperbaiki dan mengembangkan status 14 IAIN di Indonesia. Keputusan Presiden No. 9 tahun 1987 menyebutkan bahwa hukum. IAIN disamakan dengan Universitas Negeri yang ada di negeri ini. Sementara itu, pada tanggal 16 F ebruari 1991, pemerintah (melalui direktur jenderal pendidikan dasar dan menengah departemen pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan surat keputusan No. 100/C/Kep/D/1991 yang memperbolehkan para pelajar wanita muslim di S:MP dan SMA untuk memakai jilbab. Di mana sebelumnya

[40] Faisal Islamil, *Ideologi....,* h. 276-277

pemerintah melarang memakai jilbab di sekolah-sekolah swasta. Tahun 1989 pemerintah mengeluarkan UU N. 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang antara lain menegaskan dan menekankan bahwa pendidikan agama termasuk sub-sistem dari Sistem Pendidikan Nasional. Orde Baru juga mengakui keputusan-keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Islam mempunyai kedudukan sama dengan dikeluarkan oleh Pengadilan Umum. Posisi juru sita Pengadilan Agama Islam didirikan, para hakim diangkat oleh Presiden, tidak Iagi oleh Menteri Agama. Begitu juga dengan posisi, hak, dan fasilitas yang diberikan oleh negara kepada para bakim Islam adalah sama sebagaimana yang diberikan kepada para hakim di pengadilan-pengadilan yang lain[41].

Gambaran ini cukup tegas dapat disimpulkan bahwa Orde Baru pada dasarnya tidak menyukai Islam politik ataupun politik lain yang bertentangan dengan yang dibangnn dirinya atas pertimbangan stabilitas. Organisasi Islam cukup peka membaca hal ini dalam menghadapi sisi-sisi kuat rezim Soeharto. Umat harus mencari celah untuk memhuat kegiatan sosial keagamaan tetap eksis. Nahdlatul Ulama adalah salah satu potret yang menarik dikaji dalam hal ini, terbukti bahwa NU dan Muhammadiyah bisaa *survive*, walaupun terpaksa berada dalam intimidasi rezim ini.

B. Hubungan Antagonistik NU dengan Orde Baru

Kemunculan Orde Baru telah membuat NU dan kekuatan politik Islam lainnya menaruh harapan akan dapat meraih kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan masa Orde Lama Harapan itu rupanya hanyalah harapan semu. NU kurang menyadari bahwa sejak kemunculan Orde Baru situasi telah berubah; pemerintahan dikendalikan oleh kalangan birokrat, ABRI, dan teknokrat Dengan menangnya Golkar, organisasi politik dari pemerintah yang sedang berkuasa, maka mudah. Bagi pemerintah mengarahkn perkembangan politik dalam kaitannya degan pembangunan nasional. Serentak dengan itu, peranan partai politik tidak lagi sekuat seperti zaman Orde Lama. Secara khusus, NU "kehilangan"

[41] *Ibid...,* h, 281

jabatan Menteri Agama yang selalu dipercayakan pada tokohnya sejak tahun 1950-an. Jabatan Menteri Agama pada. 1971 dipercayakan seorang teknokrat tamatan sebuah Universitas di kanada yaitu Mukti Ali.[42]

Upaya yang dilakukan selama sidan MPRS bulan Februari-Maret l 967 dengan satu-satunya acara dalam agenda adalah mencabut kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soehato sebagai pejabat Presiden berhasil dilaksanakan. Tetapi beberapa tuntutan umat Islam ke agenda sidang: MPRS ditolak, Misalnya agar presiden harus seorang Muslim dan agar Negara harus didasarkan kepada Islam. Usaha memperjuangkan Sidang Mejelis Permusyawaratan Rakyat di Bulan Maret 1968 untuk pengesahan Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945 juga ditolak.[43]

Terkait dengan undang-undang pemilu Orde Baru, secara pasrah Subchan Z.E Tokoh penting NU saat itu memberi komentar bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa UU Pemilihan Umum tidak relevan dan tidak demokratis secara sempurna, Namun demikian lebih baik daripada tidak ada undang-undang pemilihan umum. Ini merupakan permulaan yang baik dari kehidupan demokrasi setelah ditinggalkan oleh rezim Soekamo."[44]

Subchan Z.E merupakan tokoh awal NU yang cukup berkualitas dalam perpolitikan awal Orde Baru. Ia terpilih menjadi ketua I (Semula ketua IV) dalam Muktamar NU ke-24 di bandung tahun 1968. Dia juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR Kritikan terhadap kalangan NU atas sikap NU selama masa Orde Lama terlalu lunak. Dipelopori oleh Subchan, ia mempunyai sekian gagasan dan ambisi membawa NU sebagai kekuatan sosial politik yang disegani. Di saat posisi NU sedang terjepit, khususnya di lembaga konstltusi, Subchan mengemukakan resep untuk mengangkat derajat NU di medan politik. Menurut Subchan, sikap ekstrim bukanlah fitrah perjuangan NU. Namun sikap oportunisme bukanlah sebuah sikap yang baik. Oportunisme menurut Subchan

[42] Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila ...,* h, 149
[43] B.J. Boland, *Pergumulan Bukan Perkembangan Islam di Indonesia* (Jakarta:), h. 165
[44] Einar Martahan Sitompul...., h. 146-148

hanya akan membuat NU akhirnya disenangi dan dipergunakan, tetapi tidak dihormati dan didengar sama sekali. Sikap Subchan tersebut menimbulkan pertentangan di dalam internal NU. Secara terang-terangan, politisi senior KR. Idham Chalid mengkritik Subchan. Tetapi Idham Chalid tidak mempunyai banyak pendukung Muktamar ke-25 di Surabaya hampir saja memilih Subchan sebagai ketua umum Tanfiziah PBNU, tetapi atas tekanan KH. Bisri Syansuri, seorang Ulama senior yang kemudian menjadi Rois Am menggantikan K.H Wachab Chasbullah, Subchan mengundurkan Diri dari pencalonan. Akhirnya keinginan Subchan kandas dengan keluarnya surat pemecatan Rois Am KH. Bisri Syansuri pada bulan Januari 1972. Tetapi Subchan menolak dengan keras pemecatan itu dan menuntut diadakan muktamar luar biasa.[45] Sayang, subchan di panggil Tuhan terlalu cepat, kematiannya juga menimbulkan misteri.

Masa Orde Baru secara keseluruhan NU untuk beberapa lama menampilkan didri sebagai kekuatan oposisi yang tergar. Hubungan NU dengan Orde baru mengalamu keretakan parah setetelah 1967 dan sejak awal 1970-an. Partai itu menjadi sumber utama kekuatan oposisi rezimOrba. Pergeseran dari sikap akomodatif ke arah aktivisme dipicu oleh serangkaian tindakan pemerintah yang di pandng bertabrakan dengan kepentingan Islam pada umumnya dan NU pada khususnya. Kondisi seperti ini mengingatkan kembali akan perjuangan-perjuangan prinsip. Dasar NU, seperti zaman belanda NU akan bersikap marah manakala ajaran-ajaran agama dilecehkan pemerintah.

Tindakan pemerintah seperti penolakan pemerintah mencantumkan Kembali Piagam Jakarta dan memperluas kewenagan pengadilan agama, diskriminasi sistematis terhadap kaum Muslim santri di lingkungan militer dan Pegawai negeri, serta semakin banyak pembatasan dan intimidasi terhadap partai-partai Islam. Yang paling dirasakan terjadinya "de-NU-isasi" oleh orde baru sejak akhir 1960-an hingga 1971 pejabat-pejabat senior dari kalangan NU bertahan digantikan oleh orang-orang dari kalangan modernis NU kehilangan jabatan Menteri Agama, sehingga sama sekali tidak

[45] *Ibid.,* h. 146-148

terwakili dalam kabinet, Hubungan antagonistik NU dengan pemerintah terus berlangsung hingga 1984, saat NU menarik diri dari partai politik dan kembali menjadi *Jam'iyah.*[46]

Babak ketiga (1973-1984) NU fusi kedalam PPP. Pada era ini NU secara relatif kembali kepada posisi semula, dimana kandidat ia merupakan pemilik konstituen terbesar dalam para fusi, namun pemegang kendali partai tidak di tangan elit-elit politis NU. Perpecahan dalam PPP terjadi manakala NU kembali di tempatkan dalam posisi Majelis Syuro. Pada saat yangsama, pembagian kursi di perlemen tidak berdasrkan pada proposi perolehan kursi seperti pada saat ia menjadi partai tersendiri. Reaksi-reaksi sebagian politis NU terhadap perlakuan seperti itu tidak pernah mendapatkan respon positif dari kalangan penguasa administrasi partai. Bahkan posisinya cenderung di lemahkan. Posisi kepemimpinan PPP yang dipegang kalangan Muslim Indonesia (MI) serta di dukung oleh pemerintah Orde Baru semakin kuat menjadikan orang-orang NU tidak berdaya dalam menghadapinya.[47]

Cobaan berat dihadapi NU ketika Orde Baru memaksa fusi partai politik dan NU dipaksa dalam fusi PPP. Pada tahap awal, dapat digambarkan di kalangan pemimpin PPP penuh semangat persaudaraan NU mampu memainkan peranannya secara optimal sebagai pengendali PPP melali lemabaga Majelis Syuro sebagai penasehat untuk urusan keagamaan. Dalam hal ini, besar sekali jasa K.H Bisri Syansuri, seorang ulama yang memiliki karisma yang menonjol jabatan yang ia miliki selaku Rois Am dan Majelis Syuro PPP memberi nasehat-nasehat dan pertimbangan dalam segala hal, terutama di bidang agama kepada partai telah ia manfaatkan secara efektif. Dengan kesenangannya memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi segenap jajaran partai, lembaga majelis Syuro yang ia pimpin di tampilkan sedemikian optimal untuk menjaga PPP sebagai suatu persekutuan yang solid.

[46] Greg Fealy...., h. 358-359
[47] Laode Ida, *NU Muda Kamum Progresif Sekularisme Baru,* (Jakarta Erlangga, 2004), h. 74

NU mengahadapi dilema, kekompakan PPP langsung mendapat ujian di lembaga DPR. Ketika pemerintah mengajukan RUU Perkawinan 1973. KH. Bisri Syansuri langsung menolak RUD itu. RUU itu memang mendapat reaksi yang keras dari berbagai kalangan Islam, pendekatan intensif pihak pemerintah akhirnya RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang. Tentunya setelah mengalami perubahan atas Seluruh pasal-pasal yang bertentangan dengan hukum perkawinan Islam. Sikap keras NU terhadap pemerintah juga terjadi, anggotanya dalam PPP meninggalkan siding (*walk out*). Sidang MPR mengesahkan P4 dan masuknya aliran kepercayaan dalam GBHN.

Rezim Orde Baru menjadikan P4 sebagai pemegang tunggal tafsir atas Pancasila, menurut rezim ini Pancasila dapat di hayati dan diamalkan oleh seluruh rkyat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara lewat P4. Mengenai aliran kepercayaan sebagai mana dikatakan oleh Soeharto beberapa bulan setelah ditetapkan oleh MPR merupakan warisan dan kekayaan rohaniyah rakyat yang harus diarahkan pada pembinaan budi luhur bangsa. Kelihatannya P4 merupakan Orde Baru menciptakan stabilitas politik sehingga program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Timbul pertanyaan, dalam hal ini apakah NU telah mengambil sekap kerasnya? Mungkinkah NU telah meninggalkan sikapnya yang fleksibel yang berulang kali dinyatakan masa Orde Lama? Fachry Ali, sebagaimana dikutip oleh Elnar Martahan Sitompunberpendapat bahwa NU pada masa Orde Baru telah mengambil sikap keras, berubah menadji kelornpok yang berani menentang arus, *rigid*, dan tidak goyah dalam pendirian. Sehingga dia menyatakan NU mengambil sikap seperti masyumi di tahun 1950-an. Einar sendiri meragukan pendapat Fachry Ali, menurut Einar, walaupun sekilas sikap NU keras tetapi bukan berarti ia meninggalkan sikapnya yang fleksibel yang sesuai dengan wataknya yang tradisional.[48] Pendapat Einar tersebut sesuai dengan sikap Subchan Z.E. Terhadap Orde Lama. NU tidak akan oportunis terhadap hal-hal yang prinsipil harus dipahami bahwa langkah NU adalah ukuran keagamaan; sepanjang

[48] Einar Martahan Sitompil....., h. 150-153

tidak mengancam keberadaan agama NU akan bersikap fleksibel, maka persoalan pancasila ini menjadi suatu perdebatan yang menarik terktitu dengan diskusi agama yang dipututskan oleh tokoh ulama NU nantinya pada masa Orde Lama, jelas-jelas NU adalah organisasi yang berani melawan komunisme.

C. Kembali Kepada Khittah: Strategi Politik Baru

Politik praktis yang dijalankan NU sejak 1955 sampai dengan 1982 telah membawajam'iyyah dan jamaah NU kepda persoalan yang betambah berat. Suasana lesu melanda tubuh NU dan masyakat, pejabat pemerintah saat itu sama sekali tidak mengerti mengenai eksistensi NU yang sebenamya kecuali parta politik, parahnya banyak yang kurang paham dan menganggap NU sudah tiada karena sudah meleburkan diri ke Dalam PPP. Keadaan seperti itu dilukiskan oleh seorang kolumnis yang juga Ketua IV PBNU, H. Mahbub Djunaidi:

> ".....Mestinya tidak ada Iagi persoalan. Nyatanya ada banyak pejabat pemerintah di daerah yang kurang paham bahkan hilang paham, seakan-akan NU itu sudah 'tiada'. Melenyap seutuhnya ke dalam tubuh PPP. Paling sedikit, tidak tahu persis gerangan apakah kelamin NU sekarang Kalau bukan parpol, lantas apa? Akibatnya, tibul kikik dan rikuh. Lebih-lebih dengan adanya Majelis Ulama yang seakan-akan pemegan hak tunggal bagi kegiatan keagamaan mauludan lewat mejelis ini, mi'raj mesti lewat majelis ini, lantas apa lagi urusan yang masih tersisa buat NU.?[49]

Kondisi semacam ini memunculkan keprihatinan bagi kelangsungan keorganisasian dan program-program utama NU dalam bidang sosial-keagamaan, Kalangan aktifis yang pro jam'iyah muncul sebagai reaksi atas pernyataan para pimpinan partai bahwa keterlibatan NU dalam kancah politik membantu tercapainya tujuan keagamaan dan kemasyarakatannya Kalangan aktifis yang prihatin dengan gerakan NU justru melihat sebaliknya, mereka mulai melihat kenyataan aktivitas NU menyeleweng dari fungsi utamanya serta

[49] Chairul Anam...., h. 271

melemahkan perjuangan Islam. Dalam pikiran yang lebih maju, politik telah menyebabkan para pemimpin NU mengabaikan peran sosial dan spiritualnya terhadap umat dan justru lebih banyak mencmahkan perhatian kepda masalah duniawi. Keadaan ini bertambah parah dan terbukti ketika para ulama dan santri yang menjauh dari kehidupan pesantren dan kegiatan kemasyarakatan karena lebih banyak melibatkan diri dalam kancah politik dan birokrasi.

Perilaku semacam itu menyebabkan menurunnya mutu pendidikan pesantren dan kehidupan keagamaan masyarakat serta telah menggerogoti integritas moral dan kewibawaan para pemimpin NU. Perilaku politik telah menyebabkan pengurus partai disibukkan oleh masalah kekuasaan dan kemajuan karier politiknya sehingga kurang memperhatikan kepentingan masyarakat bawah. Politik membutuhkan kemampuan bemegosiasi dan saling mempengaruhi serta kesiapan untuk terlibat dalam intrik dan manipulasi.

Kegelisahan akibat politik praktis sebagaimana dicatat oleh Fealy telah lama dikemukakan oleh kalangan Syuriah PBNU yang pada 1960 secara terang-terangan menyatakan bahwa penghargaan umat terhadap ulama akibat politik merosot jauh dibandingkan dengan tradisi terdahulu, Lebih lanjut ulama Syuriah NU berpendapat:

> ".....Saudara-saudara Yth, setelah kita ikut serta dalam arena politik dan memasuki gelanggang ketatanegaraan langsung, baik pusat maupun daerah-daerah Maka masyarakat itu semakin nampak terang. Sementara itu para pemimpin Islam dan alim Ulamanya sebagian besar telah sibuk mengurusi soal-soal politik dan menjalani seolah-olah yang bersangkutan pre-penghidupan duniawi umat saja. Misalnya soal-soal kedudukan DPR di daerah, parlemen, kepala-kepala daerah, jawaban-jawaban sehingga persoalan tersebut seringkali menjadi perebutan di antara mereka yang menimbulkan keretakan, antara kita dengan kita. Dengan demikiau oraganisasi menjadi lumpuh tidak terurus dan tabligh-tabligh Islam berkurang."[50]

[50] Greg Fealy...., h. 307-309

Upaya kembali kepada pemantapan kembali eksistensi NU secara tuntas sebenarnya telah di upayakan jejak 6-11 1979 dalam Mukhtamar ke-26 di semarang, Jawa Tengah. Mukhtamar ini di hadiri sekitar 4.500 warga NU berasal dari 346 cabang dan 26 wilayah NU se Indonesia. Utusan dan peninjau terdiri Kyai, Ulama, politisi, cendikiawan, dan generasi muda NU. Ada tiga masalah pokok yang menjadi perhatian dalam Mukhtamar tersebut. (1) perubahan AD/ART NU dari parpol majelis *Jam'iyyah diniyah*. (2) perumusan program pengembangan lima tahunan NU, dan (3) pemilihan pengurus baru *Jam'iyyah* NU. Dari tiga masalah pokok yang menjadi bahasan dalam Muhktamar tersebut, satu di antaranya cukup berhasil memantapkan kembali eksistensi NU sebagai *Jam'iyyah diniyah* atau organisasi sosial keagamaan. Satu masalah yang dimaksud adalah tersusunnya program dasar pengembangan lima tahun NU yang berfungsi sebagai garis-garis besar haluan kerja NU sebagai organisasi sosial keagamaan.[51]

Untuk mencapai tujuan kembali kepda khittah 1926, maka Muktamar menyusun program lima tahun. Dalam kata pendahnluan program diuraikan maksud dan bidang sasarannya.

> ".....Pada hakekatnya, Muktamar NU ke-26 adalah pemantapan NU sebagai *jam'iyyah* sehingga kegiatan kualitatif yang mengisinya adalah pembenahan kembali organisasi masyarakat. Konsilidasi organisasi Tersebut meliputi: a) Pemantapan pengnayatan dan pengalaman asas akidah *Ahlussunnah Wal Jama'ah*; dan b) Penyususnan program dasar yang memberi arahan yang tegas kepada kegiatan pengembangan NU; dan c) Tata organisasi yang menyangknt tata laksana, tata kerja, dan personalia sehingga jelaslah pegangan bagi para fungsionaris dalam mengambil setiap keputusan dan tindakan..."[52]

Keputusan Muktamar ini tegas sekali menjernihkan identitas NU sebagai organisasi keagamaan, tetapi karena semangat politisi masih kuat sekali, identitas keagamaan menjadi kabur kembali. Keputusn Muktamar 1979 agar NU kembali menjadi organisasi

[51] Chairul Anam..., h. 273-274
[52] Eniar M. Sitompul..., h. 159-160

keagamaan mulus secara konsepsional tetapi gagal secara operasional. Dengan nada agak menyesalkan, Anam mengatakan bahwa pengurus baru kurang menceeminkan secara tegas siapa yang seharusnya mengurus NU dan siapa pula yang di PPP. Nakamura, sarjana Jepang yang turut menghadiri Muktamar1979 itu mengamati bahwa Idham Chalid yang telah mendapat banyak kritik dari ulama Dengan keahlian retoriknya ia mampu menghimpun simpati dari para peserta sehingga ia dikukuhkan kembali menduduki jabatan ketua umum.[53]

Sementara itu, setelah NU memutuskan langkah yang setengah hati dalam Muktamar Semarang 1979, dalam arti bertekad mengembangkan sisi neopolitik tetapi tetap tidak meninggalkan ketertarikan politik dengan PPP, maka NU menghadapi dilema yang berkepanjangan. Persoalan antar kelompok dalam PPP menghadapi menghadapi pemilihan umum 1982 Makin mermpertajam konflik yang terjadi. Manuver kelompok MI yang mendapat dukungan pemerintah. Berhasil menggusur sejumlah nominasi calon DPR dari unsur NU.[54]

Bentuk keraguan di atas terselesaikan dalam keputusan penting yang diambil oleh NU dalam Muktamarnya di Situbondo tahun 1984. Sudah saatnya organisasi menyandarkan basis kekuatannya pada pesantren dan kembali kepada khittah 1926. Khittah merupakan ruh, jiwa, semangat, dan garis perjuangan yang menetapkan konsistensi dan independensi NU sebagai sosok organisasi keagamaan sosial kemasyarakatan (*jam'iyyah diniyah ijtima'iyah*). Ini berarti bahwa NU kembali kepada tugas semula dan menjadi organisasi yang membatasi gelanggang aktivitas dan gerakannya hanya dalam bidang sosial keagamaan dan meninggalkan arena percaturan dan pertarungan politik praktis.

NU dalam keputusannya menyatakan secara tegas bahwa ia tidak lagi mempunyai ikatan politik dengan organisasi sosial politik manapun. Bersamaan dengan itu, NU memberikan kebebasan sepenubnya kepada para anggota dan warganya untuk menyalurkan aspirasi politik mereka kepada organisasi sosial politik yang menjadi

[53] Ibid.., h. 159-160
[54] M. Ali Haidar...., h. 216

pilihan mereka, baik Golkar, PPP maupun PDI. Sebagaimana diketahui bersama, sebelum kembali ke khittah 1926, NU berfusi ke kedalam PPP dan menyalurkan aspirasi politiknya ke partai berlambang ka'bah ini.

Kembalinya NU ke khittah 1926 memberikan pula peluang dan kesempatan kepada tokoh-tokoh NU untuk secara individual aktif dalam kepengurusan partai tertentu. Ini berarti bahwa tokoh-tokoh NU boleh aktif di partai politik yang menjadi pilihan mereka asal mereka tidak mengatasnamakan atau membawa bendera NU. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada para tokoh dan warga NU untuk akrif di bidang politik dalam kapasitas mereka sebagai pribadi-pribadi dan bukan atas nama NU atau bukan mewakili NU.· Dengan demikian, indipendensi NU sebagai sosok organisasi sosial keagamaan tetap terjaga.

Motto khittah semakin dikembangkan oleh tokoh dan warga NU dalam formula yang elegan NU tidak memihak ke mana-mana, tetapi ada di mana-mana, Dilihat dari perspektif politik, pemberian kebebasan oleh NU kepada warganya untuk menyalurkan aspirasi politik pemberian kebebasab oleh NU kepada para warganya untuk menyalurkan aspirasi politik mereka kepada organisasi sosial politik manapun dapat dipangdang sebagai salah satu bentuk gerakan "pendidikan politik" yang pada gilirannya mengacu terjadinya "proses demokratisasi politik" di kalangan warga/anggota NU secara keseluruhan. Di tengah-tengah gencarnya pelaksanaan kebijakan NU yang membebaskan warganya untuk menyalurkan aspirasi politik mereka kepada organisasi soasial keagamaan manapun, organisasi yang dipimpin oleh para kyai dan ulama ini tidak luput dari gelombang tarik-tarikan godaan politik.

Tarik-tarikan politik terhada NU sudah dapat dibaca sejak awal, yaitu ingin menarik para warga NU untuk memilih salah satu partai politik untuk keuntungan politik tokoh-tokoh NU yang secara individual aktif di salah satu organisasi sosial politik. Tarikan-tarikan politik ini sudah baang tentu dilakukann dengan tujuan untuk menambang suara pemilih sebanyak mungkin di kalangan NU yang jumlahnya cukup menggiurkan. Jumlah masa NU yang besar ini dapat dilihat dalam pemilu 1987 ketika sejumlah tokoh NU

melakukan aksi "pengembosan" terhadap PPP. Akibat aksi pengembosan tersebut, perolehan suara PPP menurun secara drastis di bandingkan dengan jumlah suara yang diraihnya pada pemilu 1982 dan pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa masa NU sangat besar dan tidak bisa di remehkan begitu saja dalam kampanye perolehan suara kampanye perolehan suara pemilu.[55]

Keputusan pemilu Khittah NU dalam musyawarah nasionalis alim ulama NU 1983 di Situbondo yang di kukuhkan dalam Muktamar 1984 di tempat yang sama merupakan langkah terobosan yang didukung kalangan profesional untuk mengatasi kemacetan organisasi yang dialami NU. Segi yang menguntungkan dari gerakan ke arah kuttah itu ialah munculnya tenaga muda profesional dalam suatu jaringan kepemimpinan NU. Mereka muncul sejak era Muhktamar Semarang dan menjadi bayangan-bayangan dari skenario masa depan NU. Mereka berasal dari keluarga NU, bekerja di lapangan propesional sebagai karyawan Negara swasta serta lembaga-lembaga swadayan masyarakat dan umumnya mereka terdidik di lingkungan perguruan tinggi secara baik keuntungannya mereka tidak terbiasa penyakit politik. Karena itu konsep-konsep yang dituangkan sekalipun mengandung pragmatisme, tetapi bertolak dari asumsi-asumsi dengan vis yang lebih mendasar untuk mengantisipasi masa depan mengatasi problema kehidupan ummat Islam dan bangsa Indonesia. Oleh, karena itu gagasan yang di munculkan menyangkut problem dasar masa depan umat dan bangsa.[56]

Munas juga memberikan dukungan lebih jauh pada gagasan baru yang dikemukakan oleh kyai Ahmad Shiddiq dan Abdurrahman Wahid. Keduanya sudah lama ingin memecah isolasi budaya NU dan mendesak agar dijalin hubungan yang lebih balk dengan kelompok-kelopok Islam lainnya dan juga yang lebih menarik dengan para pemeluk agama-agama Iain. Penolakan mereka terhadap cia-cita Negara Islam dan penerimaan atas Pancasila tidak banya merupakan

[55] Faisal Ismail, *Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 33-35

[56] M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama...,* h. 219-2020

konsesi-konsesi politik yang berguna, tetapi berakar dalam pengakuan bahwa Indonesia adalah sebab masyarakat yang plural.

Kyai Ahmad Shiddiq mengernukakan dalam Munas ini serbagai konsep *ukhuwak Islamiyah* (persaudaraan sesama nuslim). Biasanya konsep ini yang mirip *eukomenikalisme* ialam dunia Kristen, dimaksudkan merujuk pada cita-cita terjalinnya hubungan yang harmonis dan saling menghormati di antara berbagai kelompok umat islam. Upaya Kyai Ahmad Shiddiq untuk memperbaiku hubungan dengan saingan lama, Muhammadiyah misalnya, diterima sebagai sesuatu yang sangat berguna bagi *ukhuwah Islamiyah.* Pada tahun-tahun terakhir ini dia telah menjabarkan konsep ini dengan menambahkan dimensi baru dan lebih luas dalam wujud "persaudaraan kebangsaan" (*ukhuwah wathaniyah*) dan “persaudaraan kemanusiaan” *(ukhuwah basyariyaht*). Kedua konsep ini lebih menjamin adanya keterbukaan dan toleransi kepada kalangan non-muslim Indonesia serta adanya kepedulian keasa isu-isu yang lebih global daripada parokial.

Kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat yang merupakan alternatif terhadap politik praktis yang dipelopori oleh Abuddurrabman Wahid dan rekan-rekannya juga mendapatkan dukungan lebih jauh dalam munas ini. sembari memberikan dukungan pada semboyan Orde Baru, mereka yang hadir secara inflasit mengkritik ketimpangan pembangunan ekonominya dan pengabaiannya terhadap golongan ekonomi lemah. Munas ini mengusulkan dilakukannya pendekatan bahwa atas dukungan pada sektor informasi dan pengendalian agar tidak terjadi ketimpangan yang mencolok dan menegaskan bahwa pesantren juga harus memainkan peran dalam pengembangan masyarakat.

D. Postulat Awai Kelahiran NU

Secara mendasar kelahiran NU berangkat atas dua motivasi penring. Pertam, keinginan ulama menyelamatkan aset-aset kultural teologis masyarakat islam tradisional, motivasi ini tidak sekedar berhadap-hadapan secara teologis dengan paham pembaharuan, tetepi lebih dari itu kepada keinginan ulama menyelamatkan akidah umat dari aksi misionaris yang gencar dilakukan oleh pihak kolonial.

Kedua, salah satu cara ulama melawan penjajah dan kolonialisme agar hilang dari bumi pertiwi dan menggapai cita-cita kemerdekaan bumi nusantara.

Kelahiran NU bermula apa yang disebut dengan komite Hijaz. Komite kaum ulam tradisional ini mempunyai keprihatinan yang mendalam terhadap dampak dari kaum puritan yang membawa tema purifikasi agama dan sepakat mengirimkan utusan ke Muhktamar Islam di Makkah. Untuk berkomunikasi secara insentif antara ulama timbul pemikiran untuk membentuk sebuah perkumpulan (*jam'iyyah*) sebagai yang berhak mengutus delegasi tersebut. Maka atas usul K.H Mas Alwi bin Abdul Aziz, *Jam'iyyah* tersebut di beri nama *Nahdlatul Ulama.*[57]

Tindakan kongkret selanjutnya dilakykan pada 13 januari 1926, sebuah kelompok yang terdiri dari lima belas kiai terkemuka berkumpul di rumah K.H. Wahab Chasbullah (1888-1971) di kertopaten, Surabaya sebagian besar mereka datang dari Jwa Timur dan masing-masing adalah tokoh pesantren. Kumpulan para kiai senior ini mempunyai tujuan memikirkan langkah bersama untuk mempertahankan kepentingan mereka praktikan. Setelah melalui diskusi, mereka memutuskan mendirikan NU untuk mewakili dan memperkokoh Islam tradisional di Hindia Belanda. Keputusan itu merupakan langkah bersejarah dan menjadi catatan penting sebagai tanggal lahirnya NU.[58]

Dasar-dasr pokok kelahiran NU dapat dilihat dari pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari dalam karyanya *al-Qanun al-asas II Jam'iyyah Nahdlatul Ulama.*[59]K.H. Hasyim Asy'ari memberi pengantar dalam buku ini mengenai pentinggnya berdirinya NU dan mengemukakan berdirinya NU atas dasar al-Qur'an yaitu kepeduluan terhadap beberapa personal umat Islam: Beberapa hal yang menjadi perhatian NU yang didasarkan atas al-Qur'an adalah:

---

[57] Chairul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Jatayu Sala, 1985), h. 68

[58] Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama Sejatah NU 1952-1967* (Yogyakarta: Lkis, 1998), h. 21

[59] Buku ini telah disadur dalam bentuk terjemahan Arab Djawa oleh H.A. Abdul Hamid sehingga menjadi *Ahyanu Amali al-Fudzalaa'fi Tarjamah Muqodimmah al-Qanun al-Asaso Li Jam'iyyah Nahdlatul Ulama,* di cetak pertama kali oleh Majelis Konsul Daerah Malang tahun 1357H/1938 M. Kemudian terjemah Arab Djawa desalin kedalam bahasa Indonesia tahun 1389H/ 1969 M oleh Mujtahal Masyhud dari Surakarta dan Abdul Karim Husen. Versi lain di sampaikan Musthafa Bisri menjelang Muktamar, NU ke- 27 tahun 1984 di Situbondo. Untuk lebih jelasnya mengenai pemikiran K.H. Hasim Asy'ari ini lihat *Ihyaau 'Amali al-Fudzala fi Tarjamaah Muqodimah Al-Qanun al-Asasi Li Jam'iyyah Nahdlatul Ulama* (Jakrta:Lakpesdam, tt)

1. Bidang Pendidikan

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ إِلَّا رِجَالٗا نُّوحِيٓ إِلَيۡهِمۡۖ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٧

"Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada Mengetahui." (QS. Al-Anbiya:7)

يُؤۡتِي ٱلۡحِكۡمَةَ مَن يَشَآءُۚ وَمَن يُؤۡتَ ٱلۡحِكۡمَةَ فَقَدۡ أُوتِيَ خَيۡرٗا كَثِيرٗاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٢٦٩

"Allah menganugerahkan Al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar Telah dianugerahi karunia yang banyak. dan Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)". (QS. Al-Bagarah:269)

وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ مُخۡتَلِفٌ أَلۡوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَۗ إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٞ ٢٨

"Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Fatir : 28)

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٥

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan". (QS. Lukman: 15)

وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولٗا ٣٦

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya". (QS. Al-Isra': 36)

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۘ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٧﴾

“Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat[183], Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat[184]. adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal”. (QS. Ali Imran:7)

2. Bidang Dakwa

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾

“Hai nabi, Sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gemgira dan pemberi peringatan”. (QS. Al-Ahzab : 45)

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي
هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ
بِٱلۡمُهۡتَدِينَ ١٢٥

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk". (QS. An-Nahl:125)

وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلۡبُشۡرَىٰۚ
فَبَشِّرۡ عِبَادِ ١٧ ٱلَّذِينَ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحۡسَنَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٨

"Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembah-nya[1310] dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba- hamba-Ku". "Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya[1311]. mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal". (QS. Al- Zumar: 17-18)

وَقُلِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمۡ يَتَّخِذۡ وَلَدٗا وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٞ فِي ٱلۡمُلۡكِ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلِيّٞ مِّنَ ٱلذُّلِّۖ وَكَبِّرۡهُ تَكۡبِيرَۢا ١١١

"Dan Katakanlah: "Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya". QS. Al-Israa': 111)

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٥٣

"Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)[152], Karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa". (QS. Al-An'am:153)

3. Masalah Kepemimpinan

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-nisaa': 59)

مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ رِجَالٞ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن يَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبۡدِيلٗا ٢٣

"Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang Telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merobah (janjinya)", (QS. Al-Ahzab: 23)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ١١٩

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar". (QS. At-Taubah:119)

وَلَا تَرۡكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنۡ أَوۡلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١١٣

"Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. (QS. Huud: 113)

وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعۡنَا وَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ ٢١

"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (munafik) vang Berkata "Kami mendengarkan [603], padahal mereka tidak mendengarkan". (QS. Al-Anfal: 21)

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu[348] dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali". (QS. An-Nisaa': 115)

وَلَوۡ أَنَّا كَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ أَنِ ٱقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ أَوِ ٱخۡرُجُواْ مِن دِيَٰرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٞ مِّنۡهُمۡۖ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۡ وَأَشَدَّ تَثۡبِيتٗا ٦٦ وَإِذٗا لَّأٓتَيۡنَٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجۡرًا عَظِيمٗا ٦٧ وَلَهَدَيۡنَٰهُمۡ صِرَٰطٗا مُّسۡتَقِيمٗا ٦٨

"Dan Sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. dan Sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)", "Dan kalau demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami". "Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus". (QS. An-Nisaa': 115)

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi[1229]. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya". (QS. Al-Ahzab: 65)

4. Melaksanakan Kebaikan: Sosial Keagamaan

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓۙ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٥٧

"(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-A;raf: 157)

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan Saudara-saudara kami yang Telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Hasr: 10)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya,dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali

kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(QS. Al-maidah: 2)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٢٠٠

“Hai orang-orang yang beriman, Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. (QS. Ali ‘Imran: 200)

إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلۡبُكۡمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡقِلُونَ ٢٢

“Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah; orang-orang yang pekak dan tuli[604] yang tidak mengerti apa-apapun”. (QS. Al-Anfal: 22)

وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali ‘Imran: 104)

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡۖ وَٱصۡبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ٤٦

"Dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar". (QS. Al-Anfal: 46)

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٦٩

"Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik". (QS. Al-Angkabut: 69)

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٠

"Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat". (QS. Al-Hujurat:10)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. Al-Hujurat: 13)

BAB III
TIGA STRATEGI NU PASCA MUKTAMAR SITUBONDO

A. Kemandirian Politik NU

Perubahan sikap politik NU dalam masa Orde Beru Menunjukkan sikap generasi muda NU yang merasa prihatin terhadap eksistensi NU dan sistem pesantrennya tertinggal oleh masyarakat modren dan pada gilirannya hanya akan menjadi barang antik yang aneh dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman.[60] Menurut penelusuran Greg barton, kaum muda pesantren sangat khawatir ada resiko NU dan sistem pesantren akan ketinggalan zaman dalam suatu masyarakat Amish dan Shaker di Amerika Serikat. Keprihatinan ini membawa kaum muda pesantren mulai berfikir kreatif untuk melkukan matrikulasi dari pesantren ke universitas dan pembinaan karir di kota dan kemudian mereka tidak lagi mempedulikan keteribatan mereka yang berada dalam NU. Juka NU berada dalam keadaan membusuk, mereka mereka tidak akan mendapat apa-apa dari apa yang diwariskan oleh orang –orang tua mereka tentang NU.[61]

[60] Greg Barton, *Biografi...,* h. 163
[61] *Ibid,* h. 174

Penelusuran dan analisis Greg Barton tersebut tidaklah selamanya benar, Barton lupa bawa kekuatan geneologis intelektual NU juga bertahan di kota dengan sejumlah semangat pembaharuan NU dan membantu NU keluar dari politik praktis. Anak-anak muda NU yang ikut di perguruan tinggi tergabung dalam pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dalam organisasi inilah nantinya anak-anak muda NU itu ke jaman intelektualnya, visi keorganisasian, kesiapan menjadi organisasi, dilaatih menjadi enterprener, dan kelak menjadi kader-kader yang aktif membangun kesadaran kritis masyarakat dalam lembaga swadaya masyarakat.

Kesadaran anak-anak muda ini tergambar dari tim penyusunan kembali ke khittah NU, kaum muda ini tergabung dari berbagai kaum intelektual muda NU dan menyusun strategi bersama Abdurrahman Wahid yang pada saat itu juga masih dapat di katakan bagian dari anak muda NU. Paling tidak, anak muda NU telah menggerakkan kaum ulama yang sebenarnya sama-sama mengalami kegelisahan terhadap keadaan NU untuk memperbaikinya dalam semua macam sub kultur yang ada. Semua komponen ini akhirnya mengarah kepada *grand dsaing* deplomatisi NU.

Sejak awal, amak muda menyadari langkahnya untuk tidak menyadarkan semua aktifitas delam gerakan politik praktis. Gerakan politik praktis NU dalam menghadapi tantangan modern baik terhadap aset organisasi maupun terhadap eksistensi pesantren, kecenderungan politisi melihat suatu hanya berdasarkan kepentingan sesaat sudah dipastikan tidak menaruh minat terhadap gerakan sosial keagamaan, apalagi keberadaan merak lebih sering di perkotakan tidak pernah turun ke desa, sebagai basis terbesar mas NU. Nahdlatul Ulama seharusnya menjadi gerakan politik tidak lagi menjadi corak organisasi *jam'iyyah diniyah*.

Sejarah Australia, M.C Ricklesfs melihat kemantapan NU dalam menghadapi ujian serius terhadap apa yang disebut depolitisasi NU. Ricklesfs melihat aliansi akar rumput yang mulai tumbuh antara ulama NU dan birokrasi mulai membuahkan hasil karena para kyai mendorong pendukung ke Golkar. Demikuan rasa lega dilihat dari tidak adanya hambatan politik dari birokrasi untuk berkerjasama dengan NU atas nama pembangunan. Dan para birokrat akhirnya

merasakan keislamannya karena kehadiran orang-orang NU, dulunya agama dianggap sebagai suatu yang "asing" bagi birokrat.[62] Suatu hal yangpatut di sesalkan dari Ricklesfs adalah ia menyatakan NU telah dikooptasi oleh negara, lebih jelas Ricklesfs mnulis.

> "perihal pendukung NU dari PPP ke Golkar nampak jelas dari hasil pemilu. April 1987. Perolehan Golkar menanjak dari 64,3% pada tahun 1982 menjadi 73,2% sementara PPP merosot dari 27,2% menjadi 16% PDI meningkat perolehannya dari 7% tahun 1982 menjadi 10,8% jadi 11% telah meninggalkan PPP, 8,9% beralih ke Golkar dan sesisanya ke PDI. Golkar bahkan menang di Aceh dengan meraih 51,8% suara, di atu PPP meraih 42,8% dan PDI hanya mendapatkan 5,4%. Kepercayaan diri rezim meningkat dengan hasil yang di capai Golkar, karena ia tampaknya menunjukan bahwa Islam sudah di kendalikan. NU rupanya sudah bisa dikooptai..."

Ungkapan Ricklesfs ini menunjukkan ketidaktahuannya terhadap tradisi NU walaupun ada usaha Orde Baru untuk melakukan kooptasi terhadap NU, secara internal NU lebih dikenal dengan sebuah usaha mendekati pemerintah dan memberikan masukan-masukan yang bersikap keulamaan, Ricklesfstidak memahami kaedah politik NU yang menganut sifat moderat (*tawassut*), menganut prinsip toleransi (*tasamuh*), dan prinsip keseimbangan (*tawazun*). Pada sisi lain NU juga menganut prinsip "apa yangtidak bisa diambil semuanya tidak boleh di tinggalkanny seluruhnya (*ma la yudraku kulluh*, *la turaku kulluh*). Prinsip ini menganjurkan mengambil hal-hal yang terbaik dari seseorang, walaupun orang tersebut melakukan kejahatan, tentunya yang perlu di tinggalkan adalah kejahatannya, bahkan jika ada kemampuan mengajak dirinya untuk mengembanggkan prinsip-prinsip baik yang dimilikinya.

Prinsip politik NU mengaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu untuk mengembangkan dan menyampaikan ajaran islam dan politik di pandang sebagai sarana efektif untuk menyampaikan tutuan

[62] M.C Ricklesfs, *Sejaran Indonesia Modern 1200-2001,* (Jakarta:PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), h 617

organisasi. Selain itu, dalam berpolitik tokoh NU selalu mengingatkan dan menjustifikasi aktifitas dan sikap politik mereka dengan kaidah-kaidah fiqihnya maupun hukum fiqihnya.[63]

Keputusan NU untuk kembali ke khittah merupakan sebuah usaha menghindari keterkaitan NU hanya dengan salah satu partai politik. Memutuskan hubungan dengan partai politik merupakan hak yang penring jika NU hendak kembali mendapatkan vitalitas dan visinya dalam melakukna kegiatan pendidikan, sosial, dan agama. Dengan demikian yang perlu ditekankan adalah bahwah keluarnya NU dari PPP merupakan formalitas keputusan organisasi, walaupun secara non formal NU diberikan kesempatan dan hak sama aktif dan memilih partai-partai lain, pada saat itu adalah Galkar PDI. Tetapi tugas secara formal dan organisatoris berubahmenjalir tugas yang leih penting dalam bidang sosial keagamaan, yaitu: melakukan pemberdayaan masyarakat. Pengalaman NU selama ini menunjukkan bahwa tidak sehat apabila agama mempunyai hubungan langsung dengan partai politik. Bahkan Orde Baru terus melakukan pembongsaian terhadap partai–partai yang menyatakan sebagai partai Islam.

Demikian pila dalam pelaksanaan pemilu 1971 (pemilih pertama pada masa pemerintahan Orde Baru), partai NU memperoleh suara sebanyak 17,67% dan muncul di pentas nasional sebagai kekuatan politik ke-2 setelah Galkar yang mendapatkan suara sebanyak 62,80% keadaan ini memperlihatkan secara jelas bahwa sasa NU yang terkonsertasi di pesantren-pesantren itu menjadi tulang punggung dan "tamabng emas" bagi partai NU dalam memperbesar jumlah perolehan suaranya dalam dua kali pemilu tersebut.

Sejak kembali ke khittah 1984, sebagai hasil peputusan Muktamar Situbondo tahun 1984, NU menyatakan tidak lagi berkecimpung dalam arena dan ajang politik praktis sekaligus NU mengumumkan dirinya tidak lagi memiliki ikatan politik dengan organisasi sosial politik maupun. Bersamaan dengan itu, NU membebaskan semua warganya (termasuk para kyai dan ulamanya)

[63] Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999 Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta:Lkis), h 64-65

untuk menyalurkan aspirasi politik mereka ke partai politik mana saja, baik Golkar, PPP, maupun PDI.

Dengan begitu hampir semua warga peantrn di seluruh tanah air yang dulunya secara politis berafiliasi pada NU di beri kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politik mereka kepada partai politik yang menjadi pilihan mereka. Barangkali kebijakan ini bisa disebut sebagai suatu upaya "pendidikan politik yang tentunya mengarah kepada "proses demokrasi politik" yang secara kultural edukatif di lakukan oleh NU terhadap pesantren-pesantren dan para warganya di seluruh tanah air.[64]

Menyusul terjadinya restrukturisasi politik pada tahun 1973 dalam kebijakan masa mengambang (*floting mass*) oleh pemerintah Orba, jaringan komunikasi politik di pesantren-pesantren menjadi tebelah, sebagian besar kubu PPP. Terbukti dalam pemilu 1987 hingga pemilu 1997, pesantren tidak lagi menjadi jaringan komunikasi politik yang efektif bagi PPP (dimana NU berfungsi di dalamnya sampai dengan tahun 1984). Sebaliknya Golkar berhasil mempengaruhi sejumlah pesantren untuk bergabung dengannya.

Hal ini ditandai oleh terjadinya konversi politik dari sejumlah pesantren dengan menyatakan diri bernaung di bawah Golkar, partai yang didukung oleh pemerintah dan militer. Kyai NU yang pertamakali menyatakan bergabung dengan Golkar adalah K.H. Mustain Ramil, pada batas tertentu, kemenangan Golkar dalam pemilu 1987 dan 1992 adalah karena keberhasilannya membangun pengaruh, saluran, dan jaringan komunikasi pelotik dengan pesantren-pesantren yang menyebabkan pesantren-pesantren mendukungnya.[65]

Perubahan sikap politik ini menyebabkan kekhawatiran dari unsur NU yang masih berada di PPP. Hal ini bisa dimaklumi karena sumber sumber utama dukungan PPP adalah dari NU. Kekhawatiran ini terbukti setelah perolehan suara nasional PPP turun dalam pemilu tahun 1987 turun sekitar 42% di bandingkan dengan suara

[64] Faisal Ismail, *Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 10-11)

[65] *Ibid.,* h. 48-49

dalam pemilu tahun 1982.[66] Dua sikap NU seperti rekomendasi bahwa pejabat-pejabat NU tidak lagi diizinkan untuk merangkap jabatan di partai-partai dengan menarik semua warga NU dari politik praktis dan diterimanya Pancasila oleh NU sebagai asas tunggal menunjukkan kemandirian politik baru.[67] Persoalan rangkap jabatan ini amat penting bagi NU, sampai-sampai PBNU mengeluarkan surat keputusan dau kali dalam tahun yang sama, yaitu tahun 1985.[68]

Kemandirian politik NU semakin tampak dengan langkah menyeimnagkan orientasi politik. Segera tampak bahwa pemerintah tidak lagi menaruh curuga terhadap NU. Kemantapan kemandirian ini terlihat dari melebarnya sayap politik NU ke Golkar dan PDI, bahkan Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum NU di terima sebagai wakil MPR dari utusan Golkar.[69] Bagi perkembangan intelektual anak muda NU. Selain tokoh yang moderat dan liberal dan merupakan penganjur kuat toleransi dan menentang eksklisivisme. Ia juga termasuk orang yang modernis, namun kenal betul dengan dunia pesantrn dan juga pengajaran Islam Klasik. Ia juga mengagumi ide-ide neomodrenis Nurcholis Madjid dan Gud Dur dan mendukung sukap progresif Islam.[70]

Program-program Munawir di antaranya adalah mendorong anak-anak muda IAIN yang di antaranya adalah didikan pesantren-pesantren NU untuk melakukan studi lebih lanjut pada tingkatan pasca sarjana di universitasiuniversitas Barat dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Atas bantuan ilmu-ilmu sosial yang mereka kaji dalam melakukan pembaruan islam. Banyak anak muda NU yang pulang dari barat mend penganjun kuat kaum neomodernis, yaitu gerakan

---

[66] Endang Turmudi, *Perselingkuhan kyai dan kekuasaan,* (Yogyakarta: Lkis, 2004), h. 150

[67] Greb Barton, *Biografi...,* h 179

[68] Kacung Marijan, *Quo Vadis NU*..., h. 58

[69] M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama*..., h. 225

[70] Munawir Sjazali depat dikatakan sebagai Menteri Agama intelektual pada masa Orde Baru. Tampaknya ia mamahami pemikiran-pemikiran pesantren dan kegelisahannya adalah bagaimana menggabungkan pola pesantren dengan kemoderenan. Penggabunagn tradisi salaf dan modern dimodifikasi Munawwir dalam gagasannya mendirikan sekolah madrasah aliyah Khususnya Provinsi dan de selesaikan hanya 40 orang. Siswa juga deberikan insentif dari dari pemerintah setiap bulan, bantuan buku- buku berbahasa Arab dari berbagai pemikiran ulama, siswa MAPK juga diasramakan. Sayang, program ini tidak dilanjutkan oleh Menteri sesudahnya bahkan Tirmizi Taher merupakan Menteri pertama yang membuat MAPK menjadi terbengkalai Karya monumental Munawir adalah *Islam dan Ketatanegaraan*.

semangat ijtihad yang berkonteks, atau metode penafsiran al-Qur'an yang memperhatikan keadaan budaya yang unik, seperti dipraktekan pada masa nabi. Sehingga orang-orang harus melakukan penyesuaian yang tepat ketika melaksanakan ajaran-ajaran al-Qur'an dalam Masyarakat kontemporer.[71] Akar klasik silam yang mereka miliki dari dunia pesantren dan pertemuan dengan ilmu-ilmu sosial, baik yang mereka temukan dari IAIN maupun Barat ikut ikut mendorong lahirnya islam progresif di kalangan anak-anak muda NU.

Seperti yang diteliti Zamakhsyari Dhofier, pesantren tidak bisa dilihat dari persfektif di kontaminasi tradisionalisme dan moderenisme, pesantren harus dilihat dari sudut *cintinuity and change*, atau sudut pendekatanadanya kesinambungan di tengah-tengah perubahan yang terjadi di pesantren. Dengan demikian, tampak bahwa perubahan yang terjadi di pesantren berdiri dengan teguh di atas landasn tradisi masa lampaunya. Ada elemen-eleme lama yang dibuang kemudian memasukan elemen baru. Ada juga kebiasaan-kebiasaan lama yang dibuang, sementara lemaga-lembaga baru dikenalkan.[72]

Upaya prubahan terhadap sistem pesantren telah dimulai pada tahun 1970-an dan berlangsung terus hingga 1980-an dan 1990-an. Perubahan tersebut difokuskan pada perubahan-perubahan terhadap kurikulum dan metode mengajar. Usaha-usaha ini berhasil meminimalisasi kesenjangan antara mutu pendidikan pesantren dengan sekolah-sekolah umum. Bahkan tak jarang ditemukan santri lebih progresif dan disiplin daripada teman-teman mereka yang berasal dari sekolah umum.

Pasca khittah dan kemandirian politik ini cukup mendukung sosialisasi kalangan santri ke dunia pendidikan luar dan berimplikasi kepada dinamika Intelektual tersendiri. Suatu hal yang menggembirakan adalah ruang terbukanya pesantren yang memungkinkan kaum santri melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Banyaknya kalangan santri yang melanjutkan stydi ke perguruan

[71] Greg Barton, *Biografi....,* h. 180-181

[72] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai,* (Jakarta: LP3Es, 1982), h. 176

tinggi memungkinkan terjadi peningkatan analisis dan ketajaman intelektual anak muda NU. Bahkan keterlibatan anak-anak muda NU masuk ke program pancasila IAIN semakin menambah vitalitas akademik anak muda dalam menapaki dunia barunya setelah selesai dari program tersebut.

Muktamar NU ke-27 di Situbondo mulai menyusun program secara sitematis dan memakai jangka waktu 1984-1989. Program lima tahun NU 1984-1989 di tuangkan dalam keputusan muktamar ke-27 No. 02/MNU-27/1984. Bidang-bidang dasar pengembangan pertama diarahkan kepada pengembangan bidang perlunya bimbingan para Ulama sebagai penyambung Rasul, warga NU membutuhkan tuntunan dan bimbingan ulama untuk mencapai keserasian antara ilmu, amal akhlak, bertaqwa, menyebabkan *Ahlusunnah Wal Jama'ah.* Kebutuhan terhadap ulama ini membutuhkan ikhtiar kaderisasi dan penyampaian bibit ulaa dengan mendorong perkembangan pesantren.[73]

Pada sisi lain pertimbangan pemberdayaan pengembangan syuriah NU ini di maksudkan untuk kebutuhan mencari ilmu lewat thariqah *Mu'tabarah Nahdliah*, *Hai'ah Ta'mirul Masjid*, *Lailatul Ijtima*' *Majlisudz Dzikir Wat Ta'lim*, dan mengembangkan kemaslahatan keluarga. Atas kebutuhan kehidupan umat yang kompleks, syuria NU menetapkan dirinya sebagai pendorong dipupuknya silaturahmin dan *islahudzatil bin* dalam mengaktifkan "ta'awun ala birri wattaqwa" dan menggairahkan pelaksanaan furudul kifayah, dengan mendorong umat melakukan usaha-usaha zira'ah, iqtishadiyah dan lain-lain. Kebutuhan memberikan masukan pemikiran di luar masail-diniahmahdlah, mubahatsah ilmiyah dan mengingatkan *Lajnatut Ta'lim Wan Nasyr* dibutuhkan sebuah tim dari PBNU secara tersendiri.[74]

Kesadaran akan reorientasi ulama tersebut mulai disadari pada periode 1989-1994, selain eksistensi lembaga ulama *syuriah* NU di katakan juga dengan program yang lebih menunjukkan komitmen terhadap demokrasi dan HAM. Dalam bidang pengembangan sumberdaya manusia, sudah mulai secara terbuka menyatakan

[73] *Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27*, (Jakarta: PBNU, 1984), h. 133-142
[74] *Ibid..,* h. 142-143

untuk mengembangkan program pendidikan dengan prinsip sebagai proses pendewasaan pengembangan partisipasi dan penyadaran masyarakat akan hak-hak mereka. Selain tetep menjaga program-program sebelimnya yang masih relevan, sebagian besar program lain bersifat melanjutkan saja program sebelumnya. Kemudian ulama NU juga menunjukkan watak okomodatifnya terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah, seperti program bidang pendidikan, perekonomian, pertanian, dan perikanan. Selain itu ditambah jiga dengan program penguatan masyarakat sipil seperti program advokasi, penguatan generasi muda, program penguatan kaum perempuan, dan kepedulian terhadap kualitas penduduk dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Konferensi kerja DPW NU Jawa Tengah di pondok pesantren Miftahul Ulum, Banyu Putih, Lumajang, 16-18 Juli misalnya memperbincangkan kelemahan-kelemahan para ulama dalam memproses perkembangan zaman serta upaya mengatasinya. Halaqah bersifat otokritik yang merumuskan kelemahan-kelemahan syuriah NU yang mencakup wawasan dan pengetahuan, sikap dan kemampuannya berorganisasi.[75]

Suatu hal yang patut di catat disini juga sebagai yang telah diteliti oleh Greg Barton bahwa ide pikiran-pikiran modern dan progresif dalam tubuh NU tidaklah muncul secara tiba-tiba. Akar pembaharuan dalam tubuh NU itu sendiri sudah ada sejan NU itu dilahirkan. Hal yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah terputusnya konsentrasi NU dalam membina dunia intelektual yang sebenarnya merupakan hakikat dari warisan ke ulamaan NU itu sendiri. Ketika arah perubahan bergeser kepada kemandirian NU, tercatatlah Gus Dur sebagai lokomotif pemikiran tradisionalis yang mendukung kembalinya ide pembaharuan (*tajdid*).[76] Perpepsi bahwa

[75] Kujang Marujan, *Qou Vadis....,* h. 201

[76] Masyarakat Indonesia, khususnya warga NU harus berinteraksi kepada Greg Barton yang telah memberikan kontribusi akademis tentang biografi Gus Dur. Setelah penulis membaca secara cermat tulisan ada medisi Australia ini banyak inspirasi yang muncul untuk terus mengkaji biografi tokoh-tokoh penting di Indonesia. Dari tulisannya inilah penulis ingin terus mengembanggkan penelitian tentang sejarah NU dan peranannya dalam bianika politik Indonesia. Pasca dilengserkannya Abdurrahman Wahid oleh oknum-oknum anti demokrasi, pikiran-pikiran Gus Dur banyak di bukukan kembali oleh *The Wahid Institute*, di antaranya : Abdurahhman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita : Agama Masyarakat Negara Demokrasi,* (Jakarta : The Wahid Institute, 2006), kemudian Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan, Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan,*

hanya kaum modernis saja yang tertarik pada ide pembaharuan di Indonesia adalah tidak benar, apalagi pembaruan Islam, jelas merupakan pendapat yang salah alamat.

Apabila dirunut secara historis, banyak pemimpin penting NU yang menyukai *tajdid*. Tokoh generasi pertama seperti Kyai Wahab Chasbullah dan Kyai Muhfidz Shiddiq merupakan tokoh yang menganjurkan perlunya kebangkitan pemikiran Islma. Pemikiran-pemikiran besar NU sebenarnya tidak menentang *tajdid*, hanya saja mereka lebih tertarik untuk membela pengetahuan dan kultur Islam klasik. Secara kritis tokoh pendahulu NU melihat pembaruan bukanlah ide puritar yang menghancurkan kultur Islam, dalam pendirian tokoh-tokoh penting NU pembaran berjalan dengan penjagaan tradisi umat Islam.

Sebaiknya perlu didiskusikan juga model pendekatan pembaruan antara NU dan kaum modernis lainnya. Dari segi pendekatan kelihatannya falam oemas Islam Indonesia ada kecenderungan memakai dua hal yang berbeda sehingga menghasilkan cara pandang yang berbeda dan kesimpulan yang berbeda pula. Kelihatannya NU lebih mengedepankan model ijtihadnya kepada pendekatan deduktif yaitu dengan mengkaji terlebih dahulu pendapat-pendapat ilmuan-ilmuan terdahulu kemudian melihat keselarasan tersebut dengan dua sumber poko, yaitu al-Qur'an dan hadist. Apabila secara holistik pendapat-pendapat ulama ada yang bertabrakan dengan al-Qur'an dan Hadist tentunya akan ditolak.

Patut dicatat juga bahwa kaum tradisional memahami konsep pembaruan (*tajdidi*) lebih beragam, berwarna, eksentif, dan dinamis daripada kaum modernis. Serjana atau Ilmuan NU dalam memahami pembaruan sangat hati-hati dalam mengembangkan suatu istilah atau makna pembaruan. Misalnya sesuatu pembaruan itu harus terlebih dahulu dimulai dari " pengembalian kesimpulan" kemudian barulah sampai kepada "mengembangkan penafsiran baru". Dalam hal ini konteks yang dikembangkan adalah tidak bisa diambil

(Jakarta: The Wahid Institute, 2007) harian kompas juga membukukan kembali tulisan-tulisan Gus Dur yang pernah dimuat di harian tersebut, yaitu: *Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat,* (jakarta:kompas, 2007)

seluruhnya. Artinya dalam sebuah permasalahan pasti ada yang bisa diambil daripeninggalan sebelumnya.

Walupun demikian, lokomotif intelek tual NU saat itu, Gus Dur dan bekas Rais Aam Syuryah, Kyai Achmad Siddiq terkenal sebagai penyeru kepada adanya semangat pentingnya *ijtihad* dan *tajdid*, sebagai mana yang dikatakan oleh saudaranya, Kyai Mahfudz Siddiq dan Kyai Wahab Chasbullah sebelumnya. Selama kepemimpinan Gus Dur, *ijtihad* makin sering dibicarakan. Terdapat perasaan umum bahwa politik ini dapat di periksa dan di perdebatkan secara terbuka pemikir-pemikir yang lebih muda, sangat ingin membicarakan pendekatan-pendekatan baru terhadap *ijtihad.*

Kesadaran *ijtihad* ini tidak terlepas dari pembicaraan pengenai pendekatan-pendekatan Islma terhadap masalah kontrasepsi, bayi tabung, mewabah AIDS, narkoba, seks bebas, dan belum pernah dibahas oleh para sarjana sebelumnya, oleh karena itu untuk mengembangkan tanggapan yang sesuai dengan masalah-masalah tersebut di perlukan praksa-praksa baru dalam menafsirkan al-Qur'an dan Hadist.

Tahun 1987, masdar farid Mas'udi dan sejarawannya di P3M, bersama-sama dengan Gus Dur, Ahmad Shiddiq, dan pemikiran-pemikiran progresif lainnya ber peran dalam mendorong di laksanakannya sebuah simposium di sebuah pesantren di Probolinggo, Jawa Timur. Simposium ini dimaksudkan untuk membuat suatu forum bagi ulama yang sepaham untuk berkumpul bersama dan terlibat dalam ijtihad kolektif.simposiun ini disebut sebagai suatu pertemuan *halaqah*. *Halaqah* merupakan usaha memperkuat ijtihad kolektif yang dinamakn *bahtsul masalaili*, atau pembahasan trhadap berbagai masalah. *Halaqah* ini merupakan siklus yang pertama dari lima *halaqah* utama yang menandai adanya pendekatan baru terhadap pemikiran Islam dalam NU.

Setahun kemudian, *halaqah* yang kedua di adakan olehpara kyai utama di seluruh Jawa, termasuk Gus Dur, yang termasuk bertempat di senarang, Jawa Tengah. *Halaqah* ini mengambil tema "epestomologi dan sifat pengetahuan tradisional pesantren". *Halaqah* lainnya di adakan di Jawa Tengah pada tahun 1989, yang di putuskan pada pemahaman dan penafsiran Kitab Kuning. Salah satu

dari motifasi utama teologi gerakan modernis adalah sebagai mana di katakan oleh Munawir Sjadzali, ijtihad dikontesktualkan: perkembangan apresiasi akan perlunya mempertimbangkan konteks-konteks klasil al-Qur'an dan Hadist ditulis, dan juga konteks sosial budaya mana kini ketika prinsip-prinsip itu deterapkan.[77]

Kegiatan mendiskusikan kembali atau reaktualisasi kitab kuning bukannya tanpa kritik, Kyai konseratif di buat jengkel dengan usaha tokoh-tokoh pemburu NU yang mulai kritis terhadap pandanagan mereka. Pengajaran kitab kuning cukup memakai pola salafi, di mana para santri muda hanya duduk mendengarkan dan menghafal teksnya. Kyailah yang memegang otoritas terhadap teks-teks itu. Sedangkan pada santri muda tidak diberiotoritas apa-apa. Adanya ide pembaruan para Kyai tua merasa adanya gangguan dari anak-anak muda dengan kritis membicarakan isi Kitab Kuning sehingga otoritas para Kyai ini mengalami erosi dan rasa hormat kepada generasi yang lebih tua juga kepada tradisipun akhirnya menjadi berkurang.[78]

Kaum intelektual NU saat itu tetep mempertahankan hujjah bahwa adanya kelompok diskusi yang meneliti kembali kitab kuning secara kritis dengan memasukkan topik-topik penting yang terkait kemoderenan. Celah ini merupakan hal penting yang harus dijalankan NU agar dapat bergulat dengan dalam realitas dunia modern. Jika NU tidak melakukan hal ini akan membawa resiko bahwa NU akan mengalami kemandekan yang lebih sering lagi, dan akhirnya lembaga dan tradisi yang dibangga-banggakan oleh NU akan mati dan hilang detelan zaman. Dengan demikian, sistem pendidikan pesantern tidak lagi perpatokan pada hafalan belaka dan penerimaan teks klasik tanpa sikap kritis. Kaum intelektual muda memang ingin melakukan lebih daripada itu dan jika keinginan mereka tercapai maka mereka akan pindah ke tempat lain.[79]

---

[77] Munawir Sjadzali, *Islam Relitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa* (Jakarta: UI Pres,1993), h.52-60

[78] *Ibid,* h. 211

[79] Greg Barton, *Biografi Gus Dur...,* h. 212

Gerakan pembaruan yang dicetuskan anak muda memebuat mereka diberi gelar sebagai kaum reformasi muda. Sebagai pendukung Gus Dur, mereka merumuskan suatu makalah mengenai sikap yang akan disampaikan mereka kepada majelis dalam sidang khusus yang diadakan bagi ornop dan aktivitas-aktivitas pembangunan dalam NU. Tema penting perjuangan NU diangkat yakni "bekerja untuk kemaslahatan masyarakat " dan "menghindari bahaya sosial". Tema ini mengingat bagi kepemimpinan NU untuk melaksanakan isinya, termasuk pandangan langsung dari luar negeri bagi proyek-proyek pembangunan masyarakat berbasis pesantren dan pengembangan suatu jaringan bank masyarakat. Dengan demikian, aktivasi pembangunan masyarakat mendapat lampu hijau untuk mencari dukungan asing bagi program-pogram mereka dan mendorong agar Kyai-kyai menjadi lebih koopretif.[80]

Kesadaran pengembangan intelektual ini menemukan respons kritis atas kebijakan negara Orde Baru yang semakin hari semakin ekslusip. Korup, dan dibuleti dengan semangat kekronian. Keprihatian terhadap ini memunculkan. strategi yang oposif berupa gerakan dan kerjasama antar masyarakat sipil.

B. Politik Akomodasi Kritis NU Terhadap Orde Baru

Politik akomodasi NU ini dimulai dengan menyelesaikan persoalan pelik terkait dengan keinginan pemerintah Orde Baru meniadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik dan organisasi keagamaan. Persoalan ini lebih lanjut memunculkan diskusi teologis seputar hubungan agama dan negara. Atau dengan kata lain, bagaimana menjadikan Pancasila yang merupakan produk manusia di atas"produk" Tuhan. Apakah dapat produk Pancasila dianggap lebih tinggi dari "produk" Tuhan?

Awalnya Pancasila sebagi asas tunggal diterima secara polemik oleh umat Islam. Diskusi mengenai asas tunggal Pancasila dalam tubuh NU berlangsung hangat dan serius, para diskusi mengenai hubungan agama dan negara sudah di mulai oleh tokoh-tokoh NU sepanjang tahun 1970-an dan 1980-an. Tokoh muda Intelektual NU

[80] *Ibid,* h. 209-210

pada saat itu, Abdurralunan Wahid sudah membuka wacana masalah-masalah sulit mengenai hubungan agama dan negara Abdurrahman Wahid sejak awal menganjurkan argumentasi bahwa sebuah konstruksi yang secara formal menetapkan peran bagi Islam dalam negara akan membawa akibat yang tidak menyenangkan, bukan saja bagi kaum non-muslim dan kaum muslim abangan, muslim santri yang tidak setuju dengan formulisasi tersebut akan merasakan akibat yang tidak menyenangkan juga.[81] Pancasila sebagai ideologi masyarakat yang beraw atak pluralistik, sepeti yang ditulis Gus Dur :

> "…..Dari berbagai ideologi masyarakat yang berkemhang di negeri ini seperti Islam, nasionalisme, sosialisme, dan lain-lain. Jelaslah dengan uraian di atas bahwa penghadapan Islam kepada Pancasila adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Karena menghadapkan sesuatu yang bersifat umum kepada pandangan yang bersifat khusus. Kalau ini diteruskan berarti rasionalitas telah ditinggalkan, dan hanya emos yang mengendalikan pandangan hidup kita. Tentu kita lebih mementingkan sesuatu yang rasional, mementingkan sesuatu yang rasional, yang emosional…"[82]

Dalam hal ini, secara seksama NU mengajak memperhitungkan bahwa Pancasila adalah produk manusa yang tidak perlu digandengkan atau diperdebatkan dengan agama yang prinsip dasarnya merupakan ajaran Tuhan Pemikian Abudrrahman Wahid itu sendiri lebih menampilkan gejala Islam sebagai tafsir manusia berkaitan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial menjadi wajar saja ketika Islam sebagai tafsir berdampingan secara sama dengan konsep manusia tentang nasionalisme dan sosialisme.

Kembali kepada diskusi keterkaitan penerimaan asas Pancasila oleh NU dengan politik. akomodasi terhadap Orde Baru, Sebelum diskusi ini dimulai harus ada kesimpulan bahwa penerimaan Pancassila oleh NU telah dilakukan secara sadar dan penuh

[81] Greg Barton, *Biografi Gusdur, The Aiuorized. Biography Of Abdurrahman Wahid* (Yogyakarta: Lkis Cet VII, 2001) h. 100

[82] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*(Jakarta: The Wahid Institute), h. 90

pertimbangan terutama yang terkait dengan karakter dasar organisasi ini yang menempatkan persoalan-persoalan besar dalam konteks pemahaman syari'a Islam. Artinya secara fiqih sudah diperhitungkan dan menjadi acuan bagi warga yang bernaung dalam organisasi berlambang bola dunia dan bintang sembilan ini. Dengan demikian Pancasila telah didaaikan dalam konteks hubungan antara teologi dan negara. Menyelesaikan polemik besar seputar format ideal hubungan agama dan negara. Cita-cita lama melihat sebuah entitas warga yang berada dalam Negara Indonesia mempunyai moral yang baik, berketuhanan dan mengaplikasikan nilai-nilai transendenspiritual merupakan tugas umat Islam di bumi persada ini.

Pancasila dan politik merupakan hal yang menarik dikaji dari segi keterpengaruhan antar NU dan kekuasaan pada masa Orde Baru. Dalam gerakan politk penerimaan NU terhadap Pancasila dapat diterjemahkan sebagai bentuk pendekatan baru NU terhadap Orde Baru Pendekatan ini dapat dikatakan sebagai pendekatan akomodatif dalam kerangka mengembalikan menjaga sifat *jam'iyah* NU sebagai organisasi sosial keagamaan.

Sikap politik ini bukannya muncul dari kaum politisi NU yang duuk dalam partai politik, sikap politik tersebut merupakan basil pemikiran politik ulama yang sebelum mengalami marginalisasi atau dimarginalkan akibat terlalu berperannya kaum politisi yang dalam tubuh PPP. Tindakan para ulama dalam berbagai aksi politik termasuk pendekatan dengan Orde Baru merupakan era dimulainya kebangkitan ulama dan usaha menyelamatkan NU untuk tetap menajdi wadah para ulama. Hal yang menarik dalam percaturan politik akomodatif para ulama dengan pemerintahan Orde Baru terjadinya tarik menarik dua kubu dalam mencari "simpati" pemerintah.[83] Dalam penerimaan pancasila sebagai asas tunggal

[83] Seperti yang telah dikupas dalam bahasan sebelumnya bahwa masa transisi NU menuju kembali ke khittah terdapat kubu politisi yang dominan dalam memainkan peran NU. Kubu politisi diwakili oleh KH. Idham Chalid yang walaupun sebenarnya adalah seorang ulama Kharismatik tetapi dalam kepemimpinannya lebih dikenal kubu politisi NU

kedua kelompok tersebut mempunyai kesamaan sikap letak perbedaannya terdapat kepada sikap idealis dan sikap realis.[84]

Kubu idealis seperti digambarkan di atas telah lama memikirkan hubungan antara Pancasila dan agama, tertentu problem teologis NU telah terlebih dahulu dihadapi dan diselesaikannya. Desakan yang dilakukan rezim politik Orde Baru adalah lain hal lain yang juga perlu dimanfaatkan secara politik oleh para ulama, Sedangkan kubu realis Iebih tampak menerima Pancasila hanyalah untuk menguatkan posisi mereka menggunakan NU semata-mata untuk kepentingan politik praktis. Kelompok realis tentunya lupa bahwa Soeharto adalah ahli strategi politik yang memandang kubu politisi NU dalam PPP sudah usang dalam sejarah.

Pendekatan tafsir Pancasila yang ditawarkan para ulama dengan kesiapan untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal merupakan sikap politik dari kaum idealis yang diterima Soeharto. Dengan demikian babakan barn politik Orde Baru selanjutnya.

Secara formal penerimaan pancasila sebagai asas tunggal diterima sebagai keputusan organisasi dalam keputusan Muktamar ke-27 NU No. 02/MNU-27/1984 tentang Angaran Dasar NU dalam pasal 2 bahwa NU berasas pancasila. Setelah itu pasal selanjutnya menempatkan masalah akidah yaitu mengikuti paham ahlussunnah wal jama'ah, kemudian dari segi produk hukum Islam mengikuti salah satu mazhab empat yaitu: Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali.[85]

Gerakan politik ulama NU ini mengingatkan pola gerakan politik ulama pada masa periode klasik Islam. Pada masa tersebut sedang terjadi gerakan bawah tanah dan terang-terangan dalam menjatuhkan dinasti Umayyah, Politik ulama pada waktu itu berusaha menghindari konflik, baik secara horizontal antar pendukung maupun konflik secara vertikal dengan pemerintah. Hasan al-Basri merupakan salah seorang ulama terkemuka yang memilih datang kepada pemerintah sembari meberikan masukan penting tentang keadaan pemerintah.

---

[84] Eminar Martahan Sitompul *NU dan Pancasila.* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989). h. 163

[85] *Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 Situbondo,* (Jakarta: PBNU, 1984), h. 112-113

Hasan al-Basri bukannya tidak menyadari perilaku dinasti Umayyah, tetapi menjatuhkan kekuasaan secara revolusi dalam pandangan Hasan al-Basri bukanlah jalan terbaik. Membiarkan kekuasaan dinasti tersebut berjalan dalam kezaliman adalah sisi yang penting untuk diingatkan, Dengan kata lain, yang perlu diperbaiki dari Umayyah adalah kesalahan-kesalahan dinasti tersebut. Ikut ambil dalam memberikan masukan-masukan tentang keluahan masyarakat atas kekuasaan adalah jalan terbaik yang perlu dilakukan oleh para ulama.

Analogi ini pula yang kelihatannya disandarkan oleh para ulama NU pada saat itu. Ulama NU bukannya tidak menyadari sikap dan perilaku Orde Baru terhadap NU.

Represifitas Orde Baru tidaklah boleh dilawan oleh sikap keras ulama, Menjelaskan (*tabayyun*) secara fatual kepada Soeharto adalah jalan tengah dalam menyelamatkan NU dari badai politik.

Analogi ini mengingatkan kisah Nabi Musa yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Musa telah diperintahkan Allah SWT untuk datang langsung kepada Fir'aun dan menyampaikan penjelasan tentang ayat Allah SWT. Ulama NU mempunyai kekhawatiran terhadap kecenderungan segelintir elite Orde Baru menciptakan suasana tandingan keagamaan adalam bentuk mencari kekuatan-kekuatan lain untuk menandingi kebenaran agama Kekhawatiran ulama bukanlah pada menjamurnya organisasi Islam, tetapi lebih kepada adanya upaya sistematis akidah islamiyah.[86]

Upaya menyelamatkan akidah ahlusunnah wal jamaah ini mengingatkan kelahiran NU yang merupakan reaksi atas perakan puritanisme Wahabi yang gemar menuding pihak lain sebagai ahli bid'ah dan sesat.[87] Pada saat itu NU memilih tidak berhadap-

[86] karena bertumpukan keapda stabilitas, Orde Baru barusaha menerapkan politik peninggian dan pelemahan keapda kekuatan-kekuatan politik Orde Lama terhadpa partai-partai Islam seperti Masyumi tokoh-tokoh lama partai ini dilarang terlibat dalam parmusi sehingga membuat partai ini tidak segagah Masyumi dulu. Karena situasi polillk seperti itu, tokoh Iegendaris Masyumi M. Natsir lebih memilih mendirikan Dewan Dakwah Isalam Indonesia (DDIl) dan merangcang misi politiknya dalam bentuk dakwah. Sedangkan NU dan Muhammadiyah karena sudah lama mengakar dalam masyarakat walaupun ada usaha pembongsaian, terutama NU, Orde Baru bisa dikatakan tidak berhasil dalam meberangus sikap politik organisasi ini Upaya mendukung organisasi atau mendirikan organisasi aliran lain lain speerti Lemkari juga tidak mendapt respons dari masyarakat secara luas.

[87] Masdar Farid Mas'udi, "pengantar" dalam Munawwir Abdul Fatah, *Tradisi Orang-orang NU* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006) h. xi

hadapan secara fisik dengan kelompok puritan tersebut, tetapi lebih melakukan pendekatan persuasif dergan melakukan pendekatan keapda pemerintah Arab Saudi.

Pendekatan NU dengan kekuasaan Orde Baru untuk memuluskan keberlangsungan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, menerima Pancasila merupakan jalan realistis dalam menghindari adanya pembubaran paksa organisasi dari pemerintah. Dalam salah satu pidato Soeharto di Riau, ia mendesak kepada semua kelompok masyarakat termasuk organisasi-oraganisasi keagamaan untuk menerima Pancasiia sebagai asas tunggal. Bahkan Gus Dur sebagai salah satu tokoh NU pada saat itu menerima informasi dari intelijen Benny Moerdani bahwa organisasi-organisasi yang menolak mengakui Pancasila sebagai asas tunggal akan menghadapi pembubaran dari pemerintah.[88]

Suatu hal yang patut disyukuri, desakan pemerintah tersebut tidak membuat para ulama sebagai pemikir landasan organisasi ini bertindak secara pragmatis hanya semata-mata menerima Pancasila dikaji secara mendalam dari sisi aspek keagamaan. Bahkan lebih lima bulan, para ulama mengkaji isi al-Qur'an, hadits, dan pandangan-pandangan yang terdapat dalam kitab kuning untuk mendapat sumber teologis dalam menerima Pancasila, Rumusan NU dalam menerima Pancasila dari sisi melihat sifat universalnya agama, pluralisme agama atau jiwa holistik agama itu sendiri. Dalam pandangan NU, karena islam bersifat pluralistik maka pelaksanaan ajaran islam juga harus bersifat pluralistik dan hal ini sesuai dengan tradisi NU.

Cara pandang inilah yang memberikan lebih banyak ruang waktu yang memungkinkan diterimanya Pancasila tanpa menimbulkan anggapan bahwa mereka telah menjual diri kepada pemerintah.[89] Menurut Greg Barton, Para ulama NU merasa lega setelah merumuskan tanggapan mengenai Pancasila karena mereka tidak lagi berseteru dengan pemerintah.[90]

---

[88] Greg Barton, *Blografi..,* h. 160
[89] *Ibid..,* 161
[90] *Ibid..,* 166

Ulama NU tentunya menyimpan sejumlah memori yang terkait dengan gencarnya Orde Baru melakukan tekanan terhadap unsur-unsnr Islam yang dianggap membangkang. Kejadian-kejadian kekerasan militer Orde Baru terhadap umat Isalm seperti kasus Tanjung Priok, kasus Tegalsairi, dan daerah-daerah lain telah menimbulkan banyak korban dari pihak umat Islam. Bahkan Islam selalu dicurigai dan dituduh sebagai kaum ekstrim kanan.

Secara keseluruhan, politik akomodasi NU terhadap umat islam mempunyai dampak yang luar biasa baik dari sikap maupun kebijakan pemerintah. Menurut kajian Abdul Aziz Thaba, asas tunggal Pancasila merupakan bentuk *political test* pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam. Karena kearifan tokoh-tokoh Islam, pihak pemerintah yang pada mulanya lebih menampilkan wajud antagonistik dengan umat Islam melihat umat Islam telah lulus dari ujian kesetiaan terhadap negara menurut versi Orde Baru. Kesadaran lain yang diharapkan umat Islam sebenamya adalah pemerintah tidak membawa negara dan masyarakat Indonesia ke arah sekularisme. Pendekatan umat Islam ini diharapkan merubah orientasi kebijakan pemerintah.[91]

Bahkan menurut Aziz Thaba, penerimaan Pancasila memunculkan dampak interen antar organisasi sosial keagamaan Islam dalam bentuk terajutnya ukhuwah Islamiyah yang lebih kuat. Umat Islam belajar banyak dari partai politik umat Islam yang sebelumnya terpecah-pecah, Penerimaan Pancasila dilakukan secara musyawarah mufakat untuk menghindari organisasi ini dimanfaatkan segelintir orang dan secara serius membatasi intervensi pemerintah dalam urusan inter rganisasi.[92] Optimisme umat Islam terlihat dari catatan majalah *Panji Masyarakat* seperti dikutip Aziz Thaba:

[91] Aziz Thaba, *Islam...,* h. 278
[92] *Ibid.,*

"....Dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas tanpa menghapus ciri keagamaan dan program perjuangan ormas bersangkutan, kita memperkirakan Undang-Undang keormasan No. 8/1985 itu bakal membawa angin segar bagi Ormas-Ormas Islam, untuk: lebih berkiprah menunaikan buktinya"[93]

Pola perubahan umat isalam secara umum menghasilkan sikap pemerintah yang berubah akomodatif dalam bentuk kebijakan boleh pemakaian jilbab di sekolah umum. Rancangan Undang-Undang peradilan agama, pengiriman seribu da'i untuk daerah-daerah terpencil, lahan transmigrasi, SKB tentang pengumpulan zakat, pelayanan haji, dan penayangan pelajaran bahasa arab di TVRI[94]

Dukungan penuh Orde Baruh tidak tangung-tanggung juga di tunjukan kepada NU Soeharto memberikan petunjuk tak lansung bahwa la mendukung Gus Dur dengan menjadikannya sebagai indoktriner resmi Pancasila,[95] yang dikenal dengan nama Manggala Nasional. Gus Dur menjadi anggota badan nasional yang bertugas untuk meformulasikan kedudukan Pancasila dalam negara dan pendidikan Pancasila untuk anak-anak sekolah Indonesia.

Dalam ruang lingkup nasional, sebagaimana banyak aspek lainnya dalam hubungan antara NU dan Orde Baru, pengankatan tokoh-tokoh NU sebagai indoktrinator resmi Pancasila merupakan hal yang penting dan strategisnamun sekaligus merupakan problem bagi kedua belak pihak. Dukungan NU akan meningkatkan legitimasi Soeharto dalam mengusung ide mengenai Pancasila sebagai asas tunggal di mata komunitas Islam Indonesia. Akan tetapi, pada saat yang sama, pengangkatan ini mendorong lebih jauh lagi pengaruh NU terhadap diskursus Pancasila dan menekankan pentingnya toleransi dan ditermanya kemajemukan sosial seperti yang terdapat dalam Pancasila. Sebelum masuknya NU, diskursus mengenai

[93] *Ibid.,*
[94] *Ibid.,*142
[95] Ketokohan Abdurrahman Wahid dalam perihal politik NU masa Orde Baru menjadi tema central tersendiri dalam blantikda politik NU pada masa Orde Baru. Dengan demikian sering kali ketika berbicara politik NU pada Masa Orde Baru, mau tidak mau kita harus membicarakan politik Abdurrahman Wahid dalam menghadapi strategi politik Soeharto.

Pancasila ini dikuasai sepenuhnya oleh negara. Kehadiran NU dapat mengubah perdebatan dan Pancasila seperti sesuatu yang mewakili sejenis agama sipil yang sekaligus mendorong maju nilai-nilai pencerahan, termasuk demokrasi dan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan melindungi kebebasan individu untuk memilih kepercayaan sendiri.

Kesediaan NU melestariakan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditambah dengan kesediaan menyampaikan secara berkesinambungan dalam masyarakat. Hubungan NU dengan militer yang sebelumnya bersifat polar menjadi semakin baik. Sebagaimana dirasakansecara umum pada saat itu, militer yang pada saat itu diman ABRI bersikap hati-hati terhadap Islam Politik dan merasa cemas akan potensi ekstrimisme yang dapat meletus menjadi kekacauan.

Abdurrahman Wahid sendiri baik kapasitasnya sebagai pribadi maupun sebagai ketua umum PBNU mempunyai hubungan yang baik dengan kepada badan intelijen militer, Benny Moerdani. Bagi Gus Dur hubungan ini bukanlah sekedar alat untuk mempengaruhi pikiran di dalam tubub militer dan kadang-kadang untuk memcahkan, persoalan seandainya ada nasalah yang timbul pada tingkat daerah. Akan tetapi hubungan yang baik ini juga memberikan masukan yang berguna bagi Gus Dur sehingga ia bisa menghitung langkah dalam memberikan masukan keapda kekuasaan Orde Baru tanpa menimbulkan reaksi amarah dari pemimpin kekuasaan tersebut.[96]

Terlepas dari itu semua, penyelesaian hubungan dengan pemerintah dengan penerimaan masalah Pancasila, secara internal NU menguatkan diri dengan pernyataan kembali ke khittah, Karakteristik historis NU kembali ke khittah menumbuhkan dan mengembalikan karakteristik organisasi ini kepada watak kemandirian, Polilitk akomodasi NU, jalan kemandirian organisasi NU sudah mengakar walaupun harus melewati terjal-terjal tajam selanjutnya.

[96] Greg Barton, *Biografi..,* h. 181-183

C. Independensi Masyarakat Sipil

Karakteristik penguatan masyarakat sipil mulai kelihatan dalam fase 1994-1999, apabila dianalisa dari sejumlah program NU dan realitis lapangan tampak bahwa rumusan program kerjanya sudah semakin dipertajam. Program terdepan adalah program pengembangan sumberdaya manusia (SDM), dimana orang-orang NU baik secara individu maupun kelompok, diharapkan sebagai kekuatan pengubah dengan cara-cara yang damai, kemunculan ide-ide sosialistik dalam gerakan NU mulai menunjukkan kepada pengembalian sebuah watak awal NU yang gemar melakukan kritik terhadap bentuk-bentuk ketidak adilan, kezaliman, dan adanya upaya pembiaran kemiskinan terhadap masyarakat marginal kota dan masyarakat desa, NU secara tegas menyatakan diri sebagai patron masyarakat dalam memperjuangkan keadailan dan berbagi dalam kesejahteraan.

Apabila dilihat dari program hasil Muktarhar ke-29 Cipasung 1994, program-program yang dicanangkan NU mulai nampak bersikap kritis dan oposif terhadap kekuasaan. Seperti masalah keterwakilan rakyat yang dirimuskan dalam masalah kemaslahatan umum, dalam hal ini NU menyampaikan prinsip syura: Pertama, wakil rakyat harus benar-benar apreasiasi dari rakyat terutama dari kalangan tertindas. Kedua, rekuitmen haruslah memperhatikan pola yang aspiratif dengan kepentingan rakyat. Ketiga, wakil rakyat harus bebas dari pengaruh dan tekanan eksekutif agar bisa memberikan penuh terhadap kemsalahatan raktya.[97]

Harapan besar dari kembalinya NU ke khittah 1926 adalah reorientasi NU dalam mengemban misi pembentukan masyarakat budaya atau masyarakat sipil. Dalam hal ini, walaupun secara sekilas tampak NU mulai berdekatan dengan negara atau dengan kata lain mulai adanya harmonis Antara NU dan Orde Baru, tidak berarti tugas NU ikut memperkuat lembaga politik yang bernama negara. Karena dalam sitem yang diharapkan terbuka di perluka komponen lain untuk memperkuat negara dan tugas tersebut secara spesifik menjadi tugas dari partai politik. Pada hakekatnya tugas pokok NU

[97] *Hasil-hail Muktama ke-29 Cipasung,* (Jakarta: Lajnah Tailif wan Nasyr PBNU, 1995) h. 31-32

adalah memperkuat eksistensi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya seperti hak-hak politik, hak-hak ekonomi, hak-hak sosial, dan hak-hak budaya. Hal ini cukup beralasan karena sejak berdirinya, NU sudah berkiprah dalam mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak budaya umat Islam di Indonesia dengan khittahnya sesuai doktrin ahlusunnah waljama'ah.

Tampaknya dalam periode 1989-1994 program NU masih menempatkan diri sebagai kekuatan yang harus selalu berjalan bersamaan dengan pemerintah. Barangkali juga ada pertimbangan strategis dalam penyusunan program NU itu, yakni bahwa dengan keserasian program dengan pemerintah sekaligus bisa memperoleh dukungan dana pemerintah untuk menjalan atau bersama-sama menjalankan programnya. Di samping itu, bisa juga dinilai bahwa strategi ini menempatkan NU untuk berhati-hati mencari bentuk baru gerakan, untuk sementara waktu membiarkan NU seolah-olah akomodatif dengan pemerintah adalah jalan tengah dalam upaya mencari jalan terbaik penguatan masyarakat sipil.

Dari segi program, mulai diarahkan pendidikan pelatihan pada proses dan penguatan peran orang-orang NU dalam perubahan sosial. Program tersebut secara umum didasarkan pada dua pengamatan: Pertama, gelombongan perubahan pada dunia yang begitu cepat haruslah direspons oleh NU secara cepat dan kritis; Kedua, dalam merespons kecepatan perkembangan budaya tersebut NU harus tetap menjaga nilai-nilai yang terkandung dan telah lama melekat dalam tubuh NU dan diyakini sebagai motivasi kejuangan sekaligus sebagai faktor yang memperkuat dalarn memcapi tujuan organisasi. Dalam kenyataannya, NU mengedepankan gerakan-gerakan yang dinamis ke perubahan yang lebih demokraris, karena program ini adalah hasil ijtihad budaya yang harus diakomodasikan oleh program-program NU, dengan memperkuat program ini, NU pada gilirannya diharapkan muncul sebagai kekuatat sosial yang tangguh.[98]

[98] Laode Ida, *NU Kaum Progresif dan Sekularisme Baru,* (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 118-119

Harapan tersebut dimulai dengan pembentukan organisasi non pemerintah (ornop), salah satunya adalah pusat pengembangan pesantren dan masyarakat (P3M). Pimpinan NU mempunyai obsesi dan memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi di luar NU untuk mendorong angota-anggota muda NU agar bisa melakukan refleksi kritis mengenai peran pesantren dan pembangunan masyarakat. Pendekatan ini diperkirakan akan lebih efektif dalam mendorong adanya inisiatif dan lebih strategis dibandingkan dengan melibatkan NU secara langsung.

Hasil nyata tercatat dari terpilihnya Masdar F. Mas'udi seorang sarjana anak muda NU saat itu yang cemerlang, terpilih untuk menjalankan tugas organisasi sehari-hari sebagai pimpinan P3M. Masdar mulai menunjukkan kecemerlangan intelektualnya dengan menulis buku dan mempublikasikan pemikiran tentang zakat dengan pendekatan baru. Dalam pandangan Masdar, pelaksanaan zakat tidaklah haurus mengikuti pola lama dalam pelaksanaan dan sistemnya Secara radikal, Masdar menyarankan bahwa sistem perpajakan modern dalam suatu negara yang berkomitmen kesejahteraan mungkin dapat menggantikan zakat. Dengan kata lain, jika kaum muslimin membayar pajak dan pajak-pajak itudigunakan secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat maka pembayaran zakat itu dapat dianggap sebagai kewajiban agama dan pemenuhan kewajiban zakat. Dalam suatu masyarakat yang biasa menghindari pembayaran pajak, usulan ini ada gunanya. Ide ini secara umum dianggap kontroversial mendapat kritikan Iuas dan cenderung di tolak kalangan luas umat Islam.[99]

Sisi lain dari pengembangan strategi masyarakat sipil adalah upaya penajaman intelektual dan kekayaan analisis wacana sosial. Lembaga kajian Islam dan Sosial yang kemudian lebih dikenal dengan *Lkis* menjadi tempat anak-anak muda mengasah ketajaman keilmuan mereka masing-masing.[100] Lembaga ini berkibar dengan

[99] penulis sendiri tertarik dengan gagasan Masdar ini dan secara teliti penulis membaca gagasan Masdar tersebut dalam bukunya berjudul Risalah Zakat tahun 1999, di Yogyakarta, gagasan Masdar ini pernah penulis kemukakan dalam "Idul Fitri" : Antara Keilahian Kemanusiaaan (*Lampung Post:* Sabtu, 5 November 2005), Lihat juga Greg Barton, h. 192

[100] *LkiS* dapat dikatakan sebagai imbas langsung pergumulan intelektual anak-anak muda NU, jalur transformasi perubahan yang ditempuh NU pasca Muktamar Situbondo telah membuat generasi baru perguruan tinggi untuk membentuk suatu wadah kreatifitas penulisan dan

muatan islam progresif yang terus aktif dalam kegiatan menulis-menulis dan penerbitan buku. Menjelang awal tahun 1990-an, sejumlah besar teks-teks kritis yang berbeda dapat ditemukan di temukan di toko-toko buku Indonesia. Sejumlah terjemahan karya-karya besar pemikir Arab dan Barat telah dihasilkan, bahkan sejumlah teks dikategorikan sebagai " kiri Islam.[101]

Nama kiri Islam ini mencari ciri khas pergaulan ilmiah anak muda NU yang bergelora dalam percaturan dunia intelektual ,baru dan terkadang dijuluki sebagai kaum progresif Islam. Suatu hal yang juga patut menjadi perhatian bahwa kaum muda NU secara sosiologis tidak hanya mengkacah pemikiran agama sacara *an sich*, melainkan juga dengan mengawinkannya dengan analisis kritis agama terhadap masalah politik dan sosial. Perkawinan agama dan politik dalam kawalan anak muda selebihnya mengbasilkan sebuah pendekatan yang tidak formalistik, tetapi menemukan substansi agama yang relevan dan memasukkannya dalam ide-ide bernegara secara segar dan ikut berdampingan dengan teori- teori lainnya.

Perubahan-perubahan sosial intelektual anak muda NU apakah dapat diukur secara langsung dengan strategi NU, tetapi mobilitas anak muda dan strategi kolektif kepemimpinan PBNU secara organisatoris dan kultural memberikan peran penting dalam menghasilkan suatu suasana terbuka bagi pemikikan kritis dan progresif anak-anak muda NU.

---

sekaligus tempat penerbitan. Anak-anak muda yang mendirikan *LkiS* awalnya adalah aktifis masjid Sunan kalijaga yang sekaligus aktifis pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan rata-rata meraka adalah alumni Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anak-anak muda ini ini merespons "kemapanan" Islam yang diwariskan. Satah satu buku terkenal yang diterbitkan oleh *Lkis* adalah tulisan Kazuo Shimozaki, *kiri Islam , Antara Modernisme, Dan Potsmodernisme, Telaah Kritis Pemikiran Hasan Hanafi.* Buku sudah mengalami enam kalicetakan dan bahkan menjadi best seller-nya *LkiS.*

[101] Suatu hal yang perli dipilah dalam masalah kajian " Kiri Islam" adalah keduanya bukan dua kata yang mempunyai arti yang berbeda, tetapi kedua kata tersebut mempunyai kata seu kesatuan sebagau majmuk atau dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *Idhafiah.* Dengan pemahaman ini dapat ditarik pemahaman kiri islam bukanlah islam itu sendiri, tetapi kiri islam merupakan sebuah pendekatan dalam studi islam, sama halnya dengan pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan-pendekatan konvensonal dalam Islam seperti *ushul fiqh, mustalahil hadist, ulumul tafsir,* dan lain-lain. Pendekatan Kiri Islam dimaksudkan sebagai sebuah kritik terhadap kemapanan pendekatan lainnya, dengan demikian pendekatan kiri Islam. Untuk lebih jelasnya mengenai pendekatan kiri Islam, lihatlah Kazou Shimozaki, *kiri Islam , Antara Modernisme, Dan Potsmodernisme, Telaah Kritis Pemikiran Hasan Hanafi,* (Yogyakarta : LkiS cet. VI, 2003)

Kembali kepada berkembangnya Ornop yang didirikan oleh para lulusan pesantren sejak pertengahan tahun 1980-an juga usaha berani untuk kembali mengkaji pemikiran Islam seperti yang terdapat dalam pertemuan-pertemuan *halaqah* dengan kuat menandakan adanya perubahan. Abdurahman Wahid sebagai Ketua Umum PBNU memberi pengaruh besar terhadap perubahan NU, terutama dalam mengubah kultur intelektualnya. Sebagai bagian dari kaum intelektual, Gus Dur telah menanamkan pengaruhnya dalam gerakan sosial yang lebih luar. Bahkan ada yang menilai sulit berkembang vitalitas intelektual kreativitas, dan kemerdekatan berkembang subur dalam tubuh NU tanpa kehadiran Gus Dur sebagai pemimpin.[102]

Perhatian lain setelah memperkuat jaringan intelektual NU adalah merumuskan dan melaksanakan secara nyata kewajiban sosial keorganisasian, Kesadaran ekonomi dalam langgam tradisional NU biasanya berjalan seiring dengan kegiatan pesantren. Menun mendiskusikan suatu ekonomi modrn dan bersifat mandiri adalah mandiri adalah suatu hal yang abru bagi NU. NU melaksanakan usaha Bank perkreditan yang dapat di jangkau bawah. NU telah mengimpi-ngimpikan adanya suatu jaringan bank pedesaan, seperti yang ada di Banglades dengan *Grameen Bank*. Jaringan bank pedsaan ini akan memberikan kredit kepada mereka yang sukar memperoleh kredit dari bank konvensonal. Bank ini diduku oleh bank semma, yang dimiliki oleh WNI keturunan Cina dan juga menerima deposito konvensonal yang mendapatkan bungan.

Dalam acara syukuran keberangkatan hai Ketua Umum Golkar, Wahono, tahun 1990, Gus Dur mengatakan PBNU mempunyai keberanian untuk mendirikan bank, dan sambil bergurau Gus Dur mengeluarkan *joker* kepada Sekjen Golkar saat itu, Watoelar, bahwa Sekjen Golkar mempunyai banyak kelebihan, tapi kelebihannya yang banyak tersebut memiliki kekurangan yang sekaligus menjadi kelebihan Gus durbahwa Witoelar tidak berani mendirikan bank sedangkan Gus Dur berani mendirikan bank.[103]

[102] Grg Barton..., h. 19-201
[103] *Lampung Post,* Selasa, 12 Juni 1990

Seperti yang dicatatkan Greg Barton, banyak pengamat pada waktu itu memuji analisis antara NU dan Bank Summa. Seperti Munawir Sjadzali menyambut gengan hangat seharusnya menjadi program prioritas NU. Bahkan Darodjatun Kontjrojakti yang saat itu menjabat Dekan Fakultas Ekonomi UI mendukung pernyataan Munawir dan menyatakan: Usaha NU-Summa adalah ide yang besar dan mestinya dimulai sejak 15 tahun lalu. Menurut analisis Greg Barton, Soeharto tidak menyatakan apa-apa secara terbuka mengenai analisis ekonomi NU dengan bank Summa, namun menurut sejumlah pejabat senior, Soeharto sangat tidak senang melihat adanya hubungan NU-Summan itu seperti ia merasa terganggu dan tidak merasa senang melihat NU di bawah kepemimpinan Gus Dur mengembangkan peran dan pengaruh sosialnya.[104]

Perlu juga dikritisi dari pendapat Greg Barton bahwa iklim politik sat itu rupanya mendukung upayaupaya tersebut. Soeharto juga ukut merasakan keprihatinan tentang kesenjangan yang terus melebar antara yang kaya dan yang miskin dan meyongsong pemilu 1992. Secara terbuka telah menghimbau kepada para pengusaha besar cina terkemuka agar melakukan sesuatu untuk mempersempit kesenjangan ini dan dengan demikian akan mencegah terjadinya "kecemburuan sosial" dan konflik keras. Dia menganjurkan pemindahan saham dari bisnis kolonmerat ke koprasi-koprasi yang diya yakini mewakili kelompok berpendapat rendah.[105]

Usha peling penting dalam rangka mengimplementasikan program untuk mendorong peningkatan ekonomi ini adalah pendirian seperti yang telah disebutkan di atas adalah usaha mengadakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NU, yang menyediakan keredit kecil bagi para wiraswastawan kecil dan petani yang berlatar belakang NU. BPR-BPR ini bukanlah bank bebas bunga, semacam bank islam yang di jalankan dengan sisitem bagi hasi, melaikan bank simpan pinjam biasa yang menarik presentase bunga. Bunga sebagaimana sangat di ketahui, merupakan isu peka yang telah melahirkan pertentangan pendapat merujuk pada sebuah kepitusan

[104] Greg Barton..., h. 213-214
[105] Lihat *Tempo,* 10 Maret 1992

yang diambil Muktamar NU terdahulu yang memperbolehkan bunga bank (milik pemerintah) dan juga usaha-usaha NU sebelumnya untuk mendirikan bank.

Sebelumnya, NU telah membentuk PT. Duta Dunia Perintis yang dipimpin oleh H. Ali Rahman, wakil Bendahara PBNU. Modal awal yang dimiliki sangat terbatas, modal pertama hanya seratus juta, oleh karena itu dalam merintis terbentuk BPR NU, organisasi ini berkerja sama dengan Bank Summa. Penandatanganannya dilakukan oleh Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid dan Edward Seryadjaya dari bank summa, tanggal 1 jni 1990.[106]

Abdurrahman Wahid mendekati dunia usaha Cina dan mengusulkan kepada panitia bersama, untuk menemukna cara-cara yang berguna untuk menyalurkan kemampuan teknis dan dana kepada para wiraswastawan pribumi berskala kecil. Ide ini cemerlang. Banyak jnga usahawan Cina yang merasa khawatir tentang bahaya kesenjangan yang terus melebar antara mereka sendiri dan mayoritas umat Islam yang miskin. Mereka sangat ingin menciptakan citra yang lebih dapat diterima dengan melibatkan diri dalam program yang diusulkan kepada mereka tersebut. Lenih dari itu, Abdurrahman Wahid merupakan salah satu yang di percayai oleh komunitas Cina.

Upaya kerjasama ekonomi NU mulai meliputi masalah retaknya hubungan Orde Baru denagn NU. Sesuatu yang pasti bagi NU bukan masalah dekatnya hubungan NU dengan kekuasaan atu masalah renggangnya hubungan NU dengan kekuasaan, tetapi NU secara kelahirannya memang mempunyai watak kemandirian. Watak kemandirian ini secara kontemporer mulai dikembangkan lebih luar lagi, yaitu pengembangan masyarakat sipil. Maka menjadi wajar ketika NU lewat kegiatan dan kevokalan dalam membangun masyarakat sipil menimbulkan ketidak senangan Soeharto.[107] Soeharto mulai melihat NU sebagai organisasi yang selalu membuat

[106] Kacung Maridjan, *Quo Vadis..,* h.207

[107] Menurut catatan R. William Liddle, Orde Baru menganut sistem otoriter dan bukan sistem totaliter, karena tidak menganut sistem totaliter, walaupun sedikit, ruang masyarakat sipil masih tersedia. Dalam ruang yang sedikit itulah menurut Lidle, NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi besar yang memanfaatkat kesempatan ruang tersebut. Untuk lebuh jelasnya, lihat R . William Liddle dalam *Tempo*, (edisi 4-10 februari 2008)

masalh dan kurang dapat dipercaya ketidaksenangan Soeharto bertambah ketika NU tidak menyatakan di depan publik menyetujuin pencalonan Soeharto sebagai presiden. Oleh karena itu, sidang MPR sebgai mana tahun 1988.[108]

Indipendensi masyarakat sipil terus dikembangkan oleh NU secara luas, walaupun menimbulkan kontroversi. NU berusaha bekerja sama dengan empat puluh intlek tual yang berasal dari berbagai kelompok agama dan masyarakat di indonesia mendirikan forum Demokrasi. Ketua PBNU Abdurrahman Wahid terpilih menjadi ketua dan juru bicara forum ini. Ketenaran dan pengaruh Gus Dur akan membuat organisasi baru ini mendapatkan kepercayaan publik tujuan didirikan Forum Demokrasi (Fordem) bukanlah berkampanye seperti partai politik dan mengharapkan kekuasaan dari mempengaruhi proses-proses politik. Forum Demokrasi didirikan untuk memberikan kekuatan pengimbang (*balance*) terhadap lembaga-lembaga seperti ICMI yang mendorong tumbuhnya pemikiran sekterianisme. Forum Demokrasi lahir atas ide pemerluas jaringan NU dalam memperjuangkan nilai-nilai plurarisme dan islam inklisif dalam rangka mengimbangi adanya kelompok-kelompok yang melakukan pemanfaatan politik sentimenaliran. Bagi NU cukuplah pengalaman era politik 1950-an yang menganut pandang partai politik berdasarkan garis agama atu ideologi. Politik bagi Ketua Umum PBNU, Abdurrahman Wahid, politk yang berdasrkan keyakinan seperti itu, pada dasarnya bersifat sektarian tidak sehat, dan anti demokrasi.[109]

Kecenderungan formalisasi islam mengancam kebersamaan kaum muslimin dan ini sudah menjadi pengalaman sejarah. Dalam pandangan foralisasi inilah negara akan mempunyai kecenderungan untuk menentukan mazhab tertentu menjadu undang-undang.[110] Dalam sebuah tulisan yang muncul tak lama setelah terbentuknya

[108] Greg Barton..... h. 218

[109] Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, terjadinya gejala nirokrasi agama menyebabkan hilangnya indeepensi umat dalam menjalani dan menyebarkan ajaran islam itu sendiri, sikap ketergantungan kepada negara akan mengikis independensi yang secara historis pernah dimiliki oleh umat islam. Oleh karena itu, menurut Gus Dur, tidak salah kalau NU terus berusaha secara perlahan menghilangkan ketergantungan tersebur. Toh, sejarah NU itu sendiri adalah sejarah kemandirian. Untuk lebih jelasnya lihat, *Gus Dur menjawab kegelisahan Rakyat,* (Jakarta: Penrbit Kompas, 2007, h. 30

[110] Abdurrahman Wahid, *Islamku*.., h. 75-76

Forum Demokrasi, Gus Dur menjelaskan mengapa ia memandang penrting tegaknya Demokrasi.[111] Forum Demokrasi merupakan kelompk kecil yang kebanyakan dari mereka bukan dari NU dab malah bukan pula muslim, banyak diantaranya beragama katolik, Protestan, dan sebagian mempunyai latar belakang sosialis. Dua dari tokoh petingginya adalah Marsalam Simanjuntak seorang sktifis sosial yang lantang dan bondan gunawan, seorang jawa abangan yang juga aktif dalam masyarakat sipil. Strategi perluasan jaringan tersebut tidak lain adalah untuk menyebarkan gagasan politik beradab kepada komponen lain dan bersatu dalam gerakan yang sama karena mempunyai prinsip perjuangan yang sama. Dalam model tidak lagi dilihat bentuk formal organisasinya, tetapi lebih kepada substensi isi dari perjuangan antar elemen yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri.

Ide-ide yang ingin dihembuskan oleh NU dalam Fordem tersebut dapat dijelaskan dalam beberap hal: (1) berpolitik bagi NU mengandung makna dan pengertian keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. (2) politik bagi NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integritas bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. (3) Politik bagi NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekan yanh hakiki dan demokratis mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban, dan tanggungjawab untuk mencapai kemaslahatan bersama. (4) Berpolitik bagi NU harus dilakukan dengan moral, etika, dan budaya yang berlandaskan pancasila. (5) Berpolitik bagi NU harus dilakukan dengan moral keagamaan konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disampaikan serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama. (6) Berpolitik bagi NU dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional dan

[111] Greg barton....., h. 225

dilaksanakan sesuai dengan *akhlak karimah* sebagai pengalaman Islam ahlusunnah wal jamaah. (7) Berpolitik bagi NU dengan dalil apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan. (8) perbedaan aspirasi politik oleh warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, *tawadhu* dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik persatuan dan kesatuan di lingkungan NU dapat terjaga. (9) Berpolitik bagi NU menurut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional, untuk menciptakan iklim yang memeungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang mandiri, dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyatukan aspirasi serta partisipasi dalam pembangunan.[112]

Selain alasan diatas konsep politik Orde Baru yang terlalu sentralistik dari tangan eksekutif telah memandulkan Lembaga-Lembaga politik negara yang lain, ketidakseimbangan dalam *trias political* menyebabkan Orde Baru tidak membuka kesempatan kontrol dari lembaga lain. Menurut AS Hakim, Orde Baru mempunyai pemahaman demokrasi otoritatif. Dalam pemahaman Orde Baru, konsepsi liberal maupun totalitarian ditolak. Sebagai alternatif penggelaran kekuasaan dilakukan eksekutif yang tersentralisasi atas nama keamana dan ketertiban (*securitty and order*) yang menjadi keabsahan utamanya.[113]

Dengan kondisi seperti di atas sangat dibutuhkan kesadaran organisasi sebesar NU untuk berani ambil bagian menjadi kekuatan perantara (*intrmediary forces*) bersama elemen seperti LSM, mahasiswa, cendikiawan, dan kalangan kelompok krisis lainnya untuk menjadi agen-agen yang mampu mengartikulasikan kepentingan rakyat yang sekaligus menjadi semacam subtitusi atau bentuk baru gerakan rakyat itu sendiri. Komponen kritis ini diharapkan mampu melakukan prose pemberdayaan rakyat lewat berbagai inisiatif seperti pelatihan, kerja sosial, pertukaran

[112] *Nalar Islam Nusantara, Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al-Irsyad Presis, dan NU,* (Jakarta: Depag Ri, 2007) h. 316

[113] Muhammad AS Hakim, *Politik Kewarganegaraan Landasan Brdemikrasi di Indonesia* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999), h. 31

informasi, pendampingan advokasi, dan seterusnya yang di tujukan untuk menciptakan saluran-saluran bagi prinsip masyarakat.

Prinsip-prinsip demokrasi yang di kembangkan oleh NU dalam perspektif lain ikut didukung oleh elemen lembaga swadayan masyrakat (LSM) yang lain, sebutlah salah satunya adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) yang didirikan oleh Ema Witoelar pada tahun 1993. Setelah satu kritik WALHI adalah penyelidikan dana reboisasi yang menentang keputusan presiden Soeharto yang meyalurkan dana reboisasi untuk industri pesawt terbang negara. Dalam pandanga WALHI keputusan pengalihan dana tersebut melanggar komitmen pemerintah untuk memperbaharui hutan hijau yang sudah lenyap. Laporan rahasia bang pembangunan asia menunjukkan bahwa depertemen kehutanan hanya mengeluarkan 16% untuk reboisasi selama empat tahun sampai maret 1993. Maka kritik WALHI terhadap keruksakan lingkungan yang dilakukan pemerintah sangat tajam.[114]

Sisi lain ketegasan NU memantapkan perjuangan masyarakat sipil adalah keberaniannya untuk mengadakan rapat akbar 1 maret 1992. Rapat akbar ini bertujuan untuk masyarakat ulang tahun yang ke-66 berdirinya NU dan upaya kampanye untuk menjauhkan perpolitikan Indonesia dari sektarianisme. Isu sektarianisme orde baru dimunculkan langsung pleh ketua umum PBNU Abdurrahman Wahid, dalam pandangan Gus Dur berdirinya ICMI lebih berorientasi politis ketimbang peningkatan peran intelektualnya, sisi politik ICMI ini dilihat dari diungkatnya isu-isu muslim yang duduk di dalamnya, arah akan berbahay dan mengarah pada formalisasi politik Islam apabila tidak diawai oleh masyarakat. Seperti di catat oleh M.Syafi'i Anwar bahwa benang merah pemikiran Gus Dur yang sangat penting adalah penolakannya terhadap formalisasi, ideologis, dan syariatisasi Islam. Sebaliknya Abdurrahman Wahid melihat bahwa kejayaan Islam justru terletak pada kemampuan agama untuk berkembang secara kultural.[115]

---

[114] Jeff Hayness, *Demikrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga Gerakan Politik Baru Terpinggirkan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), h.183-184

[115] Lihat M. Syafi'i Anwar dalam "Islamku, Islam Anda, Islam Kita, membingkai potret pemikiran politik Abdurrahman Wahid" kata pengantar dalam Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita...,* h. XV

Dalam menghadapi tekanan kuat yang dilakukan Soeharto yang berusaha memasukkan sektaranisme dalam politik Indonesia. Rapat akbar ini dilakukan untuk menyatakan kesetiaan NU pada Pancasila dalam bentuk pembaca ikrar dan sekaligus unyuk menyatakan dukungan NU bagi diselenggarakannya pemilu yang bebas dari kekerasan pada tahun yang sama dan berhasilnya sidang MPR pada awal tahun 1993.[116]

Orde Baru sangat alergi terhadap pertemuan-pertemuan besar karena akan dianggap meruask stabilitas, meskipun demikian Orde Baru tidak berani terang-terangan melarang rapat akbar ini, apalagi karena rapat ini diadakan untuk mmberikan dukungan pada pancasila. Rapat ini dihadiri 150.000 hingga 200.000 anggota NU dan rapat umum non islam pemerintah terbesar dalam kurun waktu 25 tahun. Ketua PBNU, Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa rapat umum ini mencapai asaran organisai, yaitu merayakan 66 tahun berdirinya NU, menegaskan komitmen NU terhadap Pancasila dan UUD 1945, dan untuk menyatakan dukungan bagi pemilihan umum yang akan berkelangsungan dan sidang MPR yang bebas dan damai. Abdurrahman Wahid menilai pemerintah belum memberikan kesempatan kepada NU untuk menunjudkan dukungan masa bagi suatu visi Islam Indonesia yang dicirikan oleh adanya keterbukaan, keadilan, dan toleransi. Untuk bisa melakukan semua ini, demikian katanya, diperlukan satu sampai dua jutaan orang dalam rapat akbar tersebut, Gus Dur menyatakan keyakinannya bahwa atas perintah langsung Soeharto, pihak keamana (polisi) telah banyak menghalangi banyak anggota NU yang mau menghadiri rapat akbar ini. Sebagai akibatnya, demikian tegas Gus Dur masih ada ancaman terhadap kelangsungan Pancasila dan Republik Indonesia.[117]

Hubungan luas NU tidak terjadi secara nasional saja, hubungan kerjasama antar masyarakat sipil juga dijalini secara Internasional. Kerjasama ini mencapai puncaknya ketika ketua umum PBNU Abdurrahman Wahid terpilih menjadi ketua sebuah Ornop Internasional yang berbasi di Nwe York, yaitu mengenai konferensi

[116] Greg Barton..., h. 224-227
[117] Greg Barton...., h. 228-230

mengenai agama dan perdamaian (WCRP). Penunjukkan ini secara mengejutkan diliput secara luas dalam media masa Indonesia, dan banyak orang secara terbuka mengkritik hubungannya dengan organisasi seperti itu.

Perwujudan organ NU dan masanya menjatuhkan kembali pilihan memperkuat masyarakat sipil bukannya tidak mendapat kritik dari kalangan internal NU itu sendiri. Bahkan salah satu alasan utama mengapa orang mengkritik kepemimpinan organisasi NU yang sering kali meletakkan organisasi dalam hubungan yang bertumburan dengan Rezim Soeharto. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan sipilnya, yang mengeksploitasi basis masa NU ia mengambil mengambil resiko menjadikan organisasi sebagai musuh. Semakin hari NU semakin sering melakukan manuver politik dalam bentuk kritik terbuka terhadap rezim Soeharto.[118]

Rumor yang membiak menyatakan bahwa NU telah terlalu berpolitik dan jauh dari pemerintah, Pembaruan yang dilakukan Abdurrabman Wahid dan eksponen anak muda NU bahkan menimbulkan fitnah dalam bentuk selembaran yang memojokkan ketua PBNU, selembaran berikut adalah pimpinan PBNU terlalu memberi hati kepada orang-orang non-Islam serta hubungan tokoh NU dengan sejumlah tokoh prodemokrasi yang membawa islam bertabrakan dengan pemerintah.[119]

Dalam situasi pemerintah yang masih kuat, kekhawatiran terhadap keberadaan NU memang cukup beralasan, tetapi tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa NU melakukan perlawanan terhadap negara, karena apa yang dilakukan NU merupakan sebuah kewajiban moral untuk memperbaiki dan menghantar demikrasi, jadi NU dari sejak lahirnya memang tidak cenderung mendekati kekuasaan dan tidak juga merusak kekuasaan sebuah negara, tetapi orientasinya yang lebih luas yaitu memperjuangkan sebuah kekuasaan yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Dalam pada itu masyarakat sendiri dalam pengertian swasta baru masih mempunyai kemampuan yang terbatas untuk berperan sebagai pihak yang menyediakan semua fasilitas untuk dapat berdaya.

118

119

Menurut Arbi Sanid, karena gerak perekonomian Orde baru banyak bergantung kepada pemerintah, maka sikap dan tingkah lahu elit politik sebagai pihak yang bermain dalam arena politik nasional mempunyai pengaruh yang tidak bisa diabaikan, baik dalam proses perekonomian, maupun di dalam proses pembangunan.[120] Dalam keadaan ini kemudian hari Abdurrahman Wahid melakukan kritik terhadap orientasi kekuasan yang hanya ingin mencapai dan mempertahankan kekuasaan itu. Bila dulu para pendiri repubik ini memadukan antara sapirasi pribadi maupun kepentingan umum, kini dengan tak malu-malu, sebagai pimpinan politik ketika tampak hanya memikirkan bagaimana kemenangan harus dicapai. Kalau perlu dengan cara-cara curang, manipulasi, dan intrik-intrik.[121]

Sesuatu seperti tersebut menurut NU untuk membela kepentingan hidup bermasyarakat, memperkuat kemampuan kaum lemah untuk mengubah nasib dan memperoleh hak-hak mereka dengan menumbuhkan rasa percaya diri masyrakat dalam mengolah hidup dan menolak pendekatan kekuasaan (hegomoni) serta paham serba negara dan paham serba kuasa (totaliterisme.

Mau tidak mau yang terjadi adalah realitas sosial politik yang brhadapan secara dikotomik antar hegemini institusi nehara versus upaya penguatan masyarakat sipil. Hampir seluruh aktivitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik berbeda dalam dua arus besar ini. Dalam konteks persilangan dikotomi *State versus civil society* itu organisasi masyarakat mempunyai dua pilihan. Pertama, tawaran tersebut akses politik dan ekonomi melalui penguasaan ekonomi, partai politik, dan usaha-usah perekonomian baik swasta maupun negeri, sebagai pra-syarat bagi pengembangan warga dan peran optima sebuah organisasi dalam kehidupan brbangsa dan bernegara. Mengabaikan penguasaan ini berarti hanya memerankan diri secara pikiran.

Situasi negara yang harmonik membuat NU menjatuhkan pilihan kepada model yang kedua. Mempertimbangkan kondisi masa pengikut NU sebagai kelompok paling lemah secara ekonomi dan

[120] Arbi Sanit, S*istem Politik Indonesia, Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), h. 93-94

[121] Abdurrahman Wahid, Gus Dur Menjawab kegelisahan Rakyat (Jakarta: Kompas. 2007) h. 91-92

kebanyakan tinggal di pedesaan, progam kegiatan-kegiatan ekonomi yang mengarah kepada kemandirian dalam bentuk pengembangan industri pedesaan brskala kecil, dan proyek-proyek peninggkatan kesejahteraan sosial, seperti rumah sakit, panti asuhan, dan organisasi-organisasi nasional atau intrnasional, sangat di butuhkan. Di samping kegiatan tersebut, dibutuhkan sikap hati-hati untuk mencegah terjadinya ketergantungan baru atu dominasi ekonomi oleh keras terutama NU terhadap pihak lain.

Dengan posisi yang mengambil jarak dengan negara dan menjatuhkan pilihan kepada independensi masyarakat sipil, maka NU mempunyai tekad dalam meninggkatkan kualitas umat, baik secara program maupun secara kelompok. Denagan itulah umat islam mampu memenuhi peran dan tanggung jawab mayoritas bangsa, sebagai khalifah Allah di bumi, dan sekaligus sebagai hamba yang harus selalu mengabdi dan beribadah kepada-Nya.

Secara keseluruhan, karakteristik pengembangan masyrakat sipil model NU dapat di jelaskan: pertama, NU menjadi ciri "kekuatan pembimbing spiritual dan moral umat dan bangsa ini", dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek dengan tujuan mencapai kehidupan yang maslahat, sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Kedua, NU terus berusaha secara berkesinambungan dan konsisten menjadi "*jami'yyah dniyah*/ organisa keagamaan" yang bertujuan kuntuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan ,asyrakat Indonesia yang bertaqwa kepda Allah SWT, cerdas, terampil, adil, berakhlak mulia, tentram, dan sejahtera. Ketiga, NU terus berperan aktif menperjuangkan sarana peri kehidupan yang lebih sempurna dan lebih mewujudkan keadilan sosial. Keempat, NU menjadikan warganya dan seluruh bangsa Indonesia sebagai warga negara yang senantiasa menyadari tanggung jawab dalam membangun Indonesia secara utuh, menegakkan keadilan dan kebenaran, melihat kemanusiaan dan kejujuran serta melaksanakan amar ma'rif nahi munkar. Kelima, NU menjadikan Indonesia sebagai warga negara yang meredeka, berdaulat, mandiri, terbebas dari penjajahna penganiayaan oleh siapapun dalam bentuk apapun, sehingga nilai kebenaran, keadilan

dan kemanusiaan, serta ajaran Islam yang lain, dapat dimasyarakatkan dan disatukan dengan dan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Indonesia dalam bagian bumi Allah terus yang menjadi tempat kaum muslim menghambambakan diri kepada Allah, dngan penuh ketenangan dan keluasan dalam seluruh aspek kehidupan.

Menurut pengamat Mahrus Hisyam gerakan NU pasca Khittah dalam masa orde baru mempunyai ciri gerakan budaya (*culture movement*) yaitu suatu gerakan yang mengutamakan pertumbuhan dan perkembangan pemikiran atau wawasan, pandangan, persepsi, dan penilaian termasuk di bidang politik atau kekuasaan. Di bidang politik, gerakan budaya biasanya memberikan pembatas dalam bentuk etika atau moral politik.[122] Segera tampak dalam masa khittah bahwa NU tidak meninggalkan kiprah politik sama sekali. Justru yang terjadi adalah perubahan paradigma melalui reinterpretasi dan reorientasi terhadap wacana dan praktis sehingga NU menjadi semakin lues dalam menyiasati berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi. Langkah-langkah itu memiliki kesearahan dengan kecenderungan yang sedang berkembang di beberapa negara, yakni apa yang dikenal sebagai strategi pemebrdayaan *civil socciety*.

[122] *Ibid..,* h. 3

BAB IV
KESIMPULAN

Penelusuran terhadap sikap politik NU pasca Muktamar Situbondo tahun 1984 sampai akhir era orde baru

1. dinamika perjalanan NU dalam rezim Orde Baru telah mengantarkan organisasi tersebut kepada sebuah strategi politik baru dengan kembali kepada kittah 1926 sebagaimana dideklarasikan dalam Muktamar Situbondo tahun 1984. Setelah relasi yang cukup antagonistik antar keduanya, NU melakukan sebuah re-orientasi politik dalam mengakomodasi politik Orde Baru dengan kembali kepada kittah dab fokus kepada politik pengembangan masyarakat.
2. Stategi politik NU pasca Muktamar Situbondo 1984 dalam menghadapi Orde Baru menunjukkan sebuah kemandirian politik, pola akomodasi kritis dan independensi masyarakat sipil. Politik akomodasi kritis NU di tunjukkan dalam bentuk penyelesaian persoalan petik terkait keinginan pemerintah Orde Baru menjadikan pancasila sebagai satu satunya asas bagi organisasi sosial-politik dan orgranisasi keagamaan. Persoalan ini lebih lanjut memunculkan diskusi teologis seputar hubungan agama dan negara. Kubu idealis tidak mengalami kesulitan dalam masalah ini karena problem teologis telah lama dihadapi dan dapat diselesaikan. Bahkan desakan politik Orde Baru tentang

asas tunggal dimanfaatkan secara baik para ulama idealis. Sedangkan kubu realis lebih tampak menerima pancasila hanyalah untuk menguatkan posisi mereka dan memanfaatkan Nus semata-mata untuk kepentingan politik praktis. Kemudian politik terlihat dari keputusan NU kembali ke kittah merupakan dan menghindari keterkaitan dan keterlibatan NU hanya dengan salah satu partai politik mrupakan upaya mendapatkan vitalitas dan visinya dalam melakukan kegiatan pendidikan, sosial, dan agama. Kemudian politik NU secara nyata tampak dengan langkah menyeimbangkan orientasi plotik melalui cara menciptakan keragamaan orientasi Independensi masyarakat sipil terlihat dari: pertama, NU telah berusah menjadikan ciri spritual dan moral seluruh aspek kehidupan berbangsa seperti tanggung jawab warga negara kehidupan politik, kemandirian ekonomi, keadilan sosial, dan budaya kritis dengan tujuan mencapai kemaslahatan lahir dan batin baik di dunia dan akhirat. Kedua, NU telah berperan aktif memperjuangkan pemerataan sarana perikehidupan yang lebih sempurna demi mewujudkan keadilan sosial. Ketiga, NU menjadikan warganya dan seluruh bangsa indonesia sebagai warga negara yang senantiasa menyadari tanggungjawabnya dalam membangun Indonesia secara utuh, menegakkakn keadilan dan kebenaran memelihara kemanusiaan dan kejujuran. Keempat, NU telah berusaha menjadikan warga negara yang merdeka, berdaulat, mandiri terbebas dari penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abadullah, Taufik. "Perginya Pendamai Santun". Dalam majalah *Tempo*, edisi 23-29 Juni 2008.

Anam, Chairul. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Sala: Jatayu Sala, 1985.

Asy'ari, Hasyim. *Ihyaau 'Amali al-Fudzalaa fi Tarjamah Muqoddimah al-Qanun al-Asasi li Jam'iyyah Nahdlatul Ulama.* Jakarta: Lakpesdam, tth.

Bade, Baertrand. dkk., "Introduction to Political Science" dalam Baertrand, dkk (ed). *International Encyclopedia of Political Science* (Los Angeles: SAGE Piblications, 2011.

Barton, Greg. *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid.* Yogyakarta: LkiS, 2006

Daud, Safari. "Idul Fitri: Antara Keilahian dan Kemanusaiaan" (Lampung Post: Sabtu, 5 November 2005).

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantern Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.

Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta : LkiS, 2003

Feillard, Andree. *NU Vis-a Vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Wacana.* Yogyakarta: LkiS, 1999

Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqih dalam politik*. Jakrta: Gramedia

Harjono, Anwar. *Perjalanan Politik Bangsa, Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 Situbondo. Jakarta: PBNU, 1984

Hasil-Hasil Muktamar ke-29 Cipasung. Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr PBNU, 1996

Hayness, Jeff. *Demokrasi dan Masyaraka Sipil di Dunia Ketiga, Gerakan Politik Baru Terpinggirkan*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia

Hegel, G.W.F. Filsafat Sejarah, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2001)

Hikam, Muhammad AS. *Politik Kewarganegaraan, Landasan Berdemokrasi di Indonesia*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999

Asmail, Faisal. *Dilema NU di Tengah Badai Pragmatisme Politik*. Jakarta: Departemen Agama RI, 20004.

_____*Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama. Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999

Kartodirjo, Sartono. "Metode Penggunaan Bahan Dokumen". Dalam Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Granmedia 1989.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang, 1995

Majalah *Tempo*, No.5,31 Maret 1990.

Marijan, Kajung. *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*. Jakarta: Penerbitan Erlangga, 1992.

Mas'udi, Masdar Farid. "Pengantar" dalam Fatah, Munawwir Abdul, *Tradisi Orang-orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002

Noer, Deliar. *Aku Bagian Umat, Aku Bagian Bangsa*. Jakarta: Mizan, 1996

_____.*Gerakan Modren Islam di Indonesia* 1990-1942. Jakarta: Lp3ES, 1980.

_____. *partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia* 1945-1965. Bandung: Mizan, 2000.

Notosusanto, Nugroho. *Norma-norma Dasar Dalam Penelitian Sejarah.* Jakarta: Depanhakam, 1971.

Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern* 1200-2004. Jakarta: Serambi, 2005

Sanit, Arbi. Sistem Politik Indonesia, Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan. Jakarta: Raja

Shimogaki, Kazuo. *Kiri Islam: Antara modernisme dan Post Modernisme, Telaah Kritis Pemikiran Hasan Hanafi.* Yogyakarta: LkiS cet. Vi, 2003

Sitompil. Erniar martaha. *NU dan Pancasaila.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989

Sjadzali, Munawir. *Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa.* Jakarta: UI Press, 1993

Thaba, Abdul Aziz, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru. Jakarta: Gema Insani Press

Toynbee, Arnorld. *Sejarah Umata manusia, Uraian Analisis, Kronologis, Naratif, dan Komperatif.* Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2006

Wahid, Abdurrahman. Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat, (Jakarta:Penerbit Kompas 2007).

_____. *IslamKosmopolitan, Nilai-nilai Indonesia Masyarakat Negara Kebudayaan,* Jakarta: The Wahid Institute. 2007

_____. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita :Agama masyarakat Negara Demokrasi.* Jakarta: The Wahid Institute. 2006

Zahro, Ahmad. *Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999. Trasisi Intelektual* NU. Yogyakarta: LkiS, 2004.

TENTANG PENULIS

Safari Daud, lahir di Beureuneun, Nangroe Aceh Darussalam, 01 Agustus 1975. Putera dari pasangan M. Daud Ali (alm) dan Zainabun (almh). Memulai pendidikan formal di SDN Benga, Tengse, Pidie, Nangroe Aceh Darussalam (1982 - 1988), dan dilanjutkan di MTsN Jeuram Nagan Raya, Nangroe Aceh Darussalam (1988 - 1991), MANPK Banda Aceh, Nangroe Aceh Darussalam (1991-1994). Setelah lulus Madrasah Aliyah, penulis meraih gelar sarjana S-1 di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, S-2 IAIN Raden Intan, Lampung, dan gelar doktor S-3 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Penulis pernah nyantri di Pesantren Salafiyah, Benga, Nangroe Aceh Darussalam, Pesantren Darul Falah, Jeuram, Nangroe Aceh Darussalam, Pesantren Terpadu, Jeuram, Nangroe Aceh Darussalam. Adapun pengalaman pekerjaan penulis sebagai berikut: Guru TPA SPA Gejayan, Yogyakarta (1994 - 1996), Guru Bahasa Arab, SPA Gejayan, Yogyakarta (1994-1996), Guru MAN Laboratorium Fak. Tarbiyah, IAIN Sunan Kalijaga (1998-1999), Guru TPA Masjid IAIN Sunan Kalijaga (1997-2000), Volunteer pada Lembaga Kemashlahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU), Matraman, Jakarta (2001), Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan, Lampung (2001-2004), Sekretaris Rektor IAIN Raden Intan Lampung (2002-2006), Tenaga Pengajar Fakultas Tarbiyah, IAIN Raden Intan, Lampung (2005-2006), Dosen tetap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan, Lampung (2006-sekarang), Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Lampung (2007-2008), Ketua Penyunting Jurnal Analisis, IAIN Raden Intan, Lampung (2011-2015), Ketua Program Mandiri II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung (2014-2015), Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan, Lampung (2018-2019), Wakil Dekan III, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan, Lampung (2019-2021).

Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi, pernah menjabat sebagai Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Yogyakarta (1998-1999), Sekretaris Senat Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1998-1999), Ketua Forum Kajian Masyarakat Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1998), Ketua PHBI Masjid IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1997-1999), Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Prov. Lampung, Wakil Sekretaris PWNU Lampung, dan Sekretaris I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prov. Lampung (2016-2021).

PUSAKA MEDIA

penerbit pusaka

pusakamedia@gmail.com

@pusaka_media

9 786236 024089